



RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2024



DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN MADIUN

KATA PENGANTAR

Ucapan Puji Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik serta hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024 ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Serta akan memberikan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan demi penyempurnaannya.

Selanjutnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tahun 2023 sehingga dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi pembangunan pertanian dan perikanan.

Madiun, Juli 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN



SUMANTO, SP., MMA

Pembina Tingkat I

NIP. 196509191999031006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kinerja.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Rensta.....	7
2.2 Anaisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022	11
2.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	102
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	103
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	103
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAM KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	104
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	105
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	105
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	108
BAB V PENUTUP	109
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD. Renja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2024 disusun melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja pada tahun yang bersangkutan, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja pelayanan dinas, serta penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan perikanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan kesatu Pemerintah Kabupaten Madiun 2024 – 2026 yaitu **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi”**. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Dinas Pertanian dan Perikanan 2024-2026, yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;

31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
34. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor 050/6310/402.202/2022 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan Renja adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2024 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Madiun yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Renstra yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Pertanian dan Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadikan Renja sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
3. Menjadikan Renja sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan OPD.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, pada tahun anggaran 2022 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian dan Perikanan mencapai target kinerja yang

sangat memuaskan dimana rata-rata capaian kinerja setiap programnya mencapai lebih dari 90% dari yang ditargetkan.

Secara keseluruhan terdapat 8 (delapan) program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2022 dalam mewujudkan tujuan dinas : *“Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian”* dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra												
		2019			2020			2021			2022			2023
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target
	Sebelum Perubahan													
	Nilai Tukar Petani	105,15	107,12	101,87	107,1	101,52	94,79							
	Setelah Perubahan													
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan							0,48	1,95	406,11	0,82	0,82	0,91	1,03
A	URUSAN PERTANIAN													
1	Produksi Tanaman Pangan (ton)							692.345,30	714.925,31	103,26		711.682,64		
	Produksi Padi	544.346,52	564.295,07	103,66	545.435,21	617.483,67	113,21	577.317,30	615.238,27	106,57	578.804,10	594.458,75	102,70	580.041,50
	Produksi Jagung	56.844,08	89.322,51	157,14	56.957,77	66.795,95	117,27	63.108,50	47.976,72	76,02	63.277,20	64.560,00	102,03	63.342,30
	Produksi Kedelai	2.587,16	1.483	57,32	2.592,34	1.638,61	63,21	1.644,50	1.282,32	77,98	1.663,20	1.316,19	79,14	1.703,75
	Produksi Porang				9.056,63	10.325,00	114,00	50.275,00	50.428,00	100,30	51.051,00	51.347,70	100,58	51.735,00
2	Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)							52.545,93	44.135,33	83,99		53.722,48		
	Produksi mangga	54.508	46.587	85,47	55.598	37.682	67,78	43.710,34	34.310,89	78,50	46.444,50	45.178,48	97,27	50.980,00
	Produksi durian	3.834	3.898	101,66	3.911	5.003	127,93	5.580,00	5.786,16	103,69	5.600,00	5.886,50	105,12	5.650,00
	Produksi jambu air	276	303	109,62	282	217	76,96	287,59	338,88	117,83	293,34	342,90	116,90	299,00
	Produksi cabe	635	387	60,90	648	169	26,07	196,00	184,20	93,98	205,80	293,50	142,61	220,50
	Produksi bawang merah	871	504	57,86	889	2.688	302,50	2.772,00	3.515,20	126,81	2.800,00	2.364,00	84,43	3.020,00
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan							16.884,33	13.893,71	82,29		14.250,99		
	Produksi Tebu (Ton)	19.609,50	14.213,44	72,48	20.001,69	15.011,07	75,05	15.500,72	12.537,11	80,88	16.500,00	12.883,14	78,08	17.500,00
	Produksi Kakao (Biji Kering) (Ton)	865,88	860,1	99,33	883,20	881,24	99,78	900,80	891,98	99,02	918,88	892,05	97,08	937,25
	Produksi Cengkeh (Bunga Kering) (Ton)	367,94	356,08	96,78	375,30	178,02	47,43	382,81	343,82	89,81	390,47	343,80	88,05	398,28
	Produksi tembakau (Ton)	225,19	247,25	109,80	229,69	75,05	32,67	100,00	120,80	120,80	105,00	132,00	125,71	110,00

No	Indikator Kinerja	Target Renstra												
		2019			2020			2021			2022			2023
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target
B	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN													
1	Jumlah produksi perikanan (ton)	3.909,57	4.048,53	103,55	4.165,22	4.069,60	97,70	4.087,40	4.120,77	100,82	4.123,70	4.158,50	100,84	4.160,42

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Tujuan perangkat daerah adalah “Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian” dengan indikator tujuan adalah PDRB sektor pertanian. Sedangkan sasaran adalah “Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan” dengan Indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan.

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, seperti terlihat pada Lampiran I.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan TA. 2022 untuk masing-masing komoditas unggulan serta program dan kegiatan beserta pagu anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Komoditas Tanaman Pangan

- Produksi Padi

Produksi padi pada Tahun 2022 sejumlah 594.458,75 ton atau tercapai 102,70% dari target 578.804,10 ton yang dihasilkan dari luas panen 87.925 ha dengan produktivitas 6,76 ton/ha. Namun jika dibandingkan dengan produksi padi pada tahun 2021 sejumlah 615.238,27 ton dapat dilihat bahwa produksi pada tahun ini turun sebanyak 20.779,52 ton. Pada tahun 2021 luas panen padi adalah 89.271 ha dengan produktivitas 6,89 ton/ha yang berarti baik dari segi luasan maupun produktivitasnya pun memang turun. Turunnya luas panen sebanyak 1.346 ha pada tahun 2022 disebabkan oleh adanya alih komoditas yaitu jagung seluas 1.078 ha. Faktor lainnya yaitu adanya gagal panen di area seluas 268 ha akibat kondisi asem-aseman yaitu buruknya kondisi drainase sawah dan penggunaan pupuk Urea berlebihan sehingga menyebabkan daun padi menguning kemerahan diawali dari ujung menjalar ke pangkal daun, tak lama kemudian mengering dan pertumbuhan macet. Ketika tanaman dicabut akarnya tampak berwarna coklat seperti warna besi berkarat, mudah mengelupas dan sebagian membusuk, anakan tidak terbentuk dan bisa berujung pada kegagalan tanam di beberapa area sawah di wilayah Kecamatan Balerejo (147 ha), Kecamatan Wonoasri (75 ha), Kecamatan Mejayan (21 ha), Kecamatan Saradan (13 ha), Kecamatan Madiun (12 ha). Sedangkan turunnya produktivitas padi sendiri karena adanya serangan OPT yang menyebar di beberapa wilayah di Kecamatan Balerejo yaitu Desa Sogo, Desa

Kebonagung, Desa Garon, Desa Kedungrejo, Desa Glonggong, Desa Kedungjati dengan total serangan seluas 108,64 ha.

- **Produksi Jagung**

Produksi jagung pada tahun 2022 sejumlah 64.560,00 ton dengan capaian 102,03% dari target 63.277,20 ton yang dihasilkan dari luas panen 9.962 ha dengan produktivitas 6,48 ton/ha . Jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2021 sejumlah 47.976,72 ton, produksi pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 16.583,28 ton begitu juga dengan luas panen naik sejumlah 2.780 ha. Kenaikan produksi jagung dipicu oleh naiknya minat petani untuk menanam jagung. Selain perawatan tanaman yang dinilai lebih mudah, harga jual jagung dinilai lebih menguntungkan dibandingkan komoditas lain.

- **Produksi Kedelai**

Capaian produksi kedelai pada tahun 2022 sebanyak 1.316,19 ton atau 79,14% dari target 1.663,20 ton dari luas panen 642 ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1.282,32 ton produksi kedelai masih mengalami kenaikan sebanyak 33,87 ton dari luas panen 585 ha. Tidak tercapainya target produksi kedelai pada tahun 2022 disebabkan oleh banyaknya petani yang lebih tertarik untuk menanam kacang hijau, selain perawatannya yang lebih mudah harga pasarnya pun lebih menjanjikan/tinggi pula dibandingkan dengan kedelai.

- **Produksi Porang**

Realisasi produksi porang pada tahun 2022 sebanyak 51.347,70 ton atau 100,58% dari target 51.051,00 ton yang dihasilkan dari luas panen 5.310 ha dengan produktivitas 9,67 ton/ha. Jika dibandingkan tahun 2021 (50.428,00 ton) dengan luas panen 5.080, produksi porang pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 296,7 ton. Jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya produksi porang tidak naik secara signifikan, hal ini disebabkan banyak petani yang melakukan tunda panen akibat dari tidak stabilnya harga porang di lapangan sehingga mempengaruhi produksi porang secara keseluruhan.

2. Komoditas Tanaman Hortikultura

- **Produksi Mangga**

Produksi mangga pada tahun 2022 sebanyak 45.178,48 ton atau 105,12% dari target 46.444,50 ton yang dihasilkan dari 391.958 pohon. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 (34.310,89 ton) produksi mangga pada tahun 2022 naik sebanyak 10.867,59 ton. Jika dilihat dari jumlah pohon siap panenpun, pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebanyak 38.853 pohon. Naiknya produksi mangga dipicu oleh perkembangan tanaman mangga sudah mulai produktif dari beberapa

tanaman tahun lalu, selain itu iklim yang cenderung bersahabat juga menjadikan bunga manga bisa berkembang dengan baik sampai menjadi buah dan siap panen.

- **Produksi Durian**

Realisasi produksi Durian tahun 2022 sebesar 5.886,50 ton atau 105,12% dari target 5.600,00 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 (5.786,16 ton) produksi durian tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 100,34 ton. Kenaikan produksi durian ini disebabkan pada tahun 2022 durian mampu berproduksi secara maksimal, dimana di wilayah-wilayah perkembangan durian yang tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare dan Gemarang menghasilkan durian dengan kualitas yang baik sehingga mempengaruhi kenaikan produksi di tahun ini.

- **Produksi Jambu Air**

Realisasi produksi jambu air pada tahun 2022 sebanyak 342,90 ton atau 116,90% dari target 293,50 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 (338,88 ton) produksi jambu mengalami kenaikan sebesar 4,02 ton. Peningkatan produksi jambu tidak signifikan mengingat terbatasnya budidaya jambu di Kabupaten Madiun yaitu hanya di wilayah Kecamatan Bonsari dan Kecamatan Geger. Tanaman jambu memang tidak begitu diminati oleh petani mengingat komoditas ini sangat rawan terserang gangguan hama dan pangsa pasarnya sangat terbatas sehingga petani lebih memilih menanam jambu hanya untuk kebutuhan konsumsi sendiri.

- **Produksi Cabai**

Realisasi produksi cabai pada tahun 2022 sebanyak 293,50 ton atau 142,61% dari target 205,80 ton yang dihasilkan dari luas panen 56 ha dengan produktivitas 5,24 ton/ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 (184,2 ton) produksi cabai mengalami peningkatan 109,3 ton naik hampir dua kali lipat. Naiknya produksi cabai antara lain disebabkan karena bertambahnya luas panen dari 28 ha di tahun 2021 menjadi 56 ha di tahun 2022. Bertambahnya luas panen ini tidak lepas dari adanya bantuan bibit cabai yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk lahan seluas 10ha di Kecamatan Kare. Selain itu naiknya harga cabai menarik minat petani untuk menambah luas tanam cabai sehingga mempengaruhi kenaikan produksi.

- **Produksi Bawang Merah**

Realisasi produksi bawang merah tahun 2022 sebesar 2.364,00 ton atau 84,43% dari target 2.800,00 ton yang dihasilkan dari luas panen 233 ha dengan produktivitas 10,15 ton/ha. Dibandingkan tahun 2021 (3.515,2 ton) produksi bawang merah turun 1.151,2 ton. Turunnya produksi bawang merah diakibatkan

oleh turunnya luas panen bawang merah dari 326 ha di tahun 2021 menjadi 233 ha di tahun 2022 atau turun seluas 93 ha. Turunnya luas panen jagung ini disebabkan oleh alih komoditas ke jagung, selain karena cuaca yang tidak mendukung untuk tanam bawang merah, faktor mahalannya harga benih lokal juga mempengaruhi petani untuk tidak menanam bawang merah.

3. Komoditas Tanaman Perkebunan

- Produksi tebu (gula kristal)

Realisasi produksi tebu (gula kristal) pada tahun 2022 sebesar 12.883,14 ton atau 78,08% dari target 16.500,00 ton yang dihasilkan dari luas panen 2.283,49 ha dengan produktivitas 5,64 ton/ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 (12.537,11 ton) produksi tebu naik sebesar 346,03 ton. Kenaikan produksi gula ini dipicu naiknya luas panen tanaman tebu seluas 61,34 ha pada tahun 2022.

- Produksi Kakao

Realisasi produksi biji kering Kakao pada tahun 2022 sebesar 892,05 ton atau 97,08% dari target 918,88 ton yang dihasilkan dari luas panen 2.075,33 ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 (891,98 ton) produksi kakao pada tahun 2022 naik 0,07 ton. Stagnansi produksi kakao diakibatkan banyaknya tanaman tua yang sudah tidak produktif dan tanaman-tanaman baru penggantinya belum produktif.

- Produksi Cengkeh

Realisasi produksi cengkeh tahun 2022 sebesar 343,80 ton atau 88,05% dari target 390,47 ton yang dihasilkan dari luas panen 1.046,10 dengan produktivitas 0,33 ton/ha. Dibandingkan dengan tahun 2021 (343,82 ton) produksi pada tahun 2022 turun sebanyak 0,02 ton. Turunnya produksi cengkeh ini disebabkan oleh turunnya luas panen pada tahun 2022 seluas 0,62 ha.

- Produksi Tembakau

Realisasi produksi tembakau tahun 2022 sebesar 132,00 ton atau 125,71% dari target 105,00 ha yang dihasilkan dari luas panen 120 ha dengan produktivitas 1,1 ton/ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 (120,8 ton) produksi tembakau pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 11,2 ton. Peningkatan produksi tembakau tidak lepas dari adanya alokasi DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dalam meningkatkan sarana dan prasarana produksi tembakau sehingga produksinya meningkat.

4. Produksi Perikanan

Realisasi produksi perikanan pada tahun 2022 sebesar 4.158,50 ton atau 100,84% dari target 4.123,70 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 37,73 ton. Peningkatan produksi perikanan disebabkan oleh sudah normalnya kembali berbagai sektor ekonomi pasca pandemi

covid-19 utamanya sektor wisata yang merupakan konsumen utama produk perikanan di Kabupaten Madiun. Selain itu peningkatan produksi perikanan juga ditunjang dengan adanya bantuan sarana dan prasarana perikanan baik dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

A. ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN

Pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2022

No	Belanja	Besar Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Langsung gaji	13.306.657.175	12.841.765.432	464.891.743	96,51
2.	Belanja Langsung Non Gaji	18.056.793.273	17.259.529.596	797.263.677	95,58
Jumlah		31.363.450.448	30.101.295.028	1.262.155.420	95,98

3.2 Efisiensi

Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil analisis efisiensi Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 20. Tabel Efisiensi Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		400.000.000	316.524.165	83.475.835	79,13
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		50.000.000	48.762.125	1.237.875	97,52
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>50.000.000</i>	<i>48.762.125</i>	<i>1.237.875</i>	<i>97,52</i>
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	PBH Pajak Rokok	50.000.000	48.762.125	1.237.875	97,52

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		220.000.000	204.530.000	15.470.000	92,97
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>		220.000.000	204.530.000	15.470.000	92,97
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DBH	65.000.000	49.530.000	15.470.000	76,20
		DAU	155.000.000	155.000.000	-	100,00
III	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		130.000.000	63.232.040	66.767.960	48,64
	<i>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		130.000.000	63.232.040	66.767.960	48,64
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DBH	130.000.000	63.232.040	66.767.960	48,64
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		30.963.450.448	29.784.770.863	1.178.679.585	96,19
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.585.054.685	14.054.734.960	530.319.725	96,36
	<i>A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		7.500.000	7.154.200	345.800	95,39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PAD	7.500.000	7.154.200	345.800	95,39
	<i>B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		13.306.657.175	12.841.765.432	464.891.743	96,51
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	13.306.657.175	12.841.765.432	464.891.743	96,51
	<i>C. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		413.682.093	366.721.864	46.960.229	88,65
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD	7.000.000	6.957.500	42.500	99,39

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	24.630.000	24.461.750	168.250	99,32
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD	30.805.000	30.774.412	30.588	99,90
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD	129.600.000	129.424.140	175.860	99,86
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD	10.000.000	9.789.340	210.660	97,89
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD	4.400.000	4.200.000	200.000	95,45
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD	175.247.093	159.164.722	16.082.371	90,82
		DBH	32.000.000	1.950.000	30.050.000	6,09
	<i>D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>406.442.177</i>	<i>391.397.964</i>	<i>15.044.213</i>	<i>96,30</i>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD	5.000.000	4.990.092	9.908	99,80
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DBH	117.270.417	109.671.237	7.599.180	93,52
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD	280.421.760	276.736.635	3.685.125	98,69
		DAU	3.750.000	-	3.750.000	0,00
	<i>E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>450.773.240</i>	<i>447.695.500</i>	<i>3.077.740</i>	<i>99,32</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD	123.000.000	121.984.620	1.015.380	99,17
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rutin/Berkala Alat Kantor (AC, Komputer, mesin Ketik)	PAD	20.000.000	19.954.400	45.600	99,77
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD	91.073.240	89.527.530	1.545.710	98,30
		DBH	209.700.000	209.243.950	456.050	99,78

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD	7.000.000	6.985.000	15.000	99,79
V	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1.596.033.250	1.520.217.122	15.000	95,25
	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>		<i>1.596.033.250</i>	<i>1.520.217.122</i>	<i>75.816.128</i>	<i>95,25</i>
	A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DBH + DBHCHT	600.000.000	588.554.280	11.445.720	98,09
	* Pengembangan Kebun Bibit	DBH	134.552.500	134.054.260	498.240	99,63
	* Demplot Kacang Hijau	DBH	15.447.500	14.436.950	1.010.550	93,46
	* Bantuan Sarana Produksi/Bibit Hortikultura (Cukai)	DBHCHT	450.000.000	440.063.070	9.936.930	97,79
	B. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DBHCHT	996.033.250	931.662.842	64.370.408	93,54
VI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		9.850.252.263	9.614.939.687	235.312.576	97,61
	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>		<i>2.198.462.734</i>	<i>2.088.574.220</i>	<i>109.888.514</i>	<i>95,00</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	DBH + DBHCHT	2.198.462.734	2.088.574.220	109.888.514	95,00
	* Pengadaan obat-obatan untuk persediaan	DBH	295.539.654	294.357.940	1.181.714	99,60
	* Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau	DBHCHT	1.902.923.080	1.794.216.280	108.706.800	94,29
	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>		<i>7.651.789.529</i>	<i>7.526.365.467</i>	<i>125.424.062</i>	<i>98,36</i>
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DAK FISIK	6.283.884.800	6.226.544.550	57.340.250	99,09
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DBH	947.489.929	879.406.117	68.083.812	92,81

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
		DAU	420.414.800	420.414.800	-	100,00
VII	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		548.000.000	535.898.100	12.101.900	97,79
	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>		<i>548.000.000</i>	<i>535.898.100</i>	<i>12.101.900</i>	<i>97,79</i>
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DBH	48.000.000	47.859.500	140.500	99,71
		DAU	500.000.000	488.038.600	11.961.400	97,61
VIII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		4.384.110.250	4.058.980.994	325.129.256	92,58
	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>		<i>4.384.110.250</i>	<i>4.058.980.994</i>	<i>325.129.256</i>	<i>92,58</i>
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DBH	200.000.000	197.873.390	2.126.610	98,94
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DBHCHT	705.000.000	697.754.254	7.245.746	98,97
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	DAK NON FISIK	106.500.000	95.490.000	11.010.000	89,66
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	IPDMIP	3.372.610.250	3.067.863.350	304.746.900	90,96
JUMLAH			31.363.450.448	30.101.295.028	1.262.155.420	95,98

Realisasi anggaran tersebut diatas utamanya dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang telah ditentukan baik pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 21. Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	50.000.000		48.762.125	97,52
	* Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		0,1	0,04	40,0
1.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000		48.762.125	97,52
	* Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		508.916 kg	509.400 kg	100,09
1.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	50.000.000		48.762.125	97,52
	* Jumlah benih ikan yang diperbantukan		50.000 ekor	145.050 ekor	290,10
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	220.000.000		204.530.000	92,97
	* Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		1%	1,04	104
2.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	220.000.000		204.530.000	92,97
	* Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		3.614.774 kg	3.649.100 kg	100,95
2.1.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000		204.530.000	92,97
	* Jumlah penyediaan pakan ikan di UPT		1 paket	1 paket	100%
3.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	130.000.000		63.232.040	48,64
	* Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan		2%	30,6%	1530
3.1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	130.000.000		63.232.040	48,64
	* Jumlah UMKM pengolahan ikan		15 unit usaha	16 unit usaha	106,67

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.1.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000		63.232.040	48,64
	* Jumlah Produk Olahan Ikan		10.400 kg	13.334 kg	128,21
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.585.054.685		14.054.734.960	96,36
	* Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A	BB	
	* Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)		90	85	
4.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000		7.154.200	95,39
	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu		100%	100%	100%
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000		7.154.200	95,39
	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku		12 dok	14 dok	116,67%
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.306.657.175		12.841.765.432	96,51
	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	100%	100%
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.306.657.175		12.841.765.432	96,51
	Jumlah gaji yang terpenuhi		12 bln	100%	100%
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.682.093		366.721.864	88,65
	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	100%	100%
4.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000		6.957.500	99,39

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi		12 bln	12 bln	100%
4.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.630.000		24.461.750	99,32
	Jumlah sarana perkantoran yang terpenuhi		12 bln	12 bln	100%
4.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.805.000		30.774.412	99,90
	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang terpenuhi		12 bln	12 bln	100%
4.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.600.000		129.424.140	99,86
	Jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia		12 bln	12 bln	100%
4.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000		9.789.340	97,89
	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi		12 bln	12 bln	100%
4.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.400.000		4.200.000	95,45
	Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi		12 bln	12 bln	100%
4.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.247.093		161.114.722	77,74
	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		12 bln	12 bln	100%
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.442.177		391.397.964	96,30
	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	100%	100%
4.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000		4.990.092	99,80
	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi		12 bln	12 bln	100%
4.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.270.417		109.671.237	93,52
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bln	12 bln	100%

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.171.760		276.736.635	97,38
	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan		12 bln	12 bln	100%
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.773.240		447695500	99,32
	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara		100%	100%	100%
4.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.000.000		121.984.620	99,17
	Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran yang dilaksanakan		12 bln	12 bln	100%
4.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000		19.954.400	99,77
	Jumlah pemeliharaan peralatan perkantoran yang dilaksanakan		12 bln	12 bln	100%
4.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.773.240		298.771.480	99,33
	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran yang dilaksanakan		12 bln	12 bln	100%
4.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000		6.985.000	99,79
	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran lainnya yang dilaksanakan		12 bln	12 bln	100%
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.596.033.250		1.520.217.122	95,25
	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian		8,14%	7,24%	88,94%
5.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.596.033.250		1.520.217.122	95,25
	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian		18 kel	16 kel	88,89%

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	600.000.000		588.554.280	98,09
	Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan		700 btg	-	-
	Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan		1850 btg	2.730 btg	147,57%
5.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	996.033.250		931.662.842	93,54
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan		53 unit	1.089 unit	2.178
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.850.252.263		9.614.939.687	97,61
	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik		4%	4%	100
6.1	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	2.198.462.734		2.088.574.220	95,00
	Jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan :				
	* pupuk		39.533 kg	17.133 kg	43,34
	* bibit		1.621.158 btg	767.610 btg	47,35
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	2.198.462.734		2.088.574.220	95,00
	Jumlah subsidi harga pupuk		367.500 kg	-	-
	Jumlah sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan :				
	* Alsintan		6 unit	15 unit	250
	* Jalan produksi		3 unit	3 unit	100
	* Jaringan irigasi		3 unit	2 unit	66,67
6.2	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	7.651.789.529		7.526.365.467	98,36

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik		1.978 unit	1.978 unit	100
6.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.283.884.800		6.226.544.550	99,09
	Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara		10 unit	20 unit	200
6.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.367.904.729		1.299.820.917	95,02
	Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik		400 ltr	475 ltr	118,75%
7.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	548.000.000		535.898.100	97,79
	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian		99,05	87,40	87,84%
7.1	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	548.000.000		535.898.100	97,79
	Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian		11,41%	68,92%	604,44%
7.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	548.000.000		535.898.100	97,79
	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati		45 kel	272kel	604,44%
8.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.384.110.250			
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani		7%	7,67%	109,57%
8.1	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	4.384.110.250		4.058.980.994	92,58
	<i>Jumlah peningkatan kelas kelompok tani</i>		180 kel	197 kel	109,44%
8.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	200.000.000		197.873.390	98,94

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek		96 orang	92 orang	95,83%
8.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	705.000.000		697.754.254	98,97
	Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan		600 orang	460 orang	76,67%
8.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	106.500.000		95.490.000	89,66
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian		75%	75%	100%
8.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	3.372.610.250		3.067.863.350	90,96
	Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan		20 SL	20 SL	100%
	JUMLAH	31.363.450.448		30.101.295.028	95,98

1.4 Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

A. URUSAN PERIKANAN

I. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memiliki anggaran Rp 50.000.000,- dengan serapan sebesar Rp 48.762.125,-. Indikator program Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan target 0,1% dan tercapai 0,04% atau 40% dari target. Kecilnya capaian target program ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

Banyak faktor yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap antara lain :

1. Faktor Alam

Hasil penangkapan ikan di perairan darat sangat tergantung dengan kondisi alam (angin, perubahan cuaca dan musim). Oleh Karena itu produksi perikanan tangkap mengenal musim paceklik. Hal inilah yang menyebabkan mayoritas nelayan perairan darat Kabupaten Madiun merupakan nelayan sambilan atau mempunyai sambilan mata pencaharian lain selain nelayan, salah satunya yaitu bertani.

2. Faktor Nelayan

Dengan mayoritas nelayan Kabupaten Madiun yang berstatus nelayan sambilan mempengaruhi jumlah hari penangkapan (trip). Rata-rata nelayan melakukan penangkapan sebanyak 20 hari dari 30 hari kalender tiap bulannya.

3. Faktor Potensi Lahan

Perairan darat terdiri dari Waduk, Sungai dan Genangan (Kali Mati dan embung). Dengan lahan perikanan tangkap yang tidak mengalami perluasan, menyebabkan produksi perikanan tangkap tidak bisa mengalami kenaikan yang melonjak.

4. Faktor Kelestarian Ikan dan Lingkungan

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, perairan darat Kabupaten Madiun banyak mengalami over fishing dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (jenis krakat dan jaring dengan mesh dibawah 3,5”), sehingga banyak ikan kecil yang tertangkap. Walaupun telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan Kegiatan Restocking (Penebaran Benih Ikan), hal tersebut tetap menyebabkan terganggunya kelestarian dan keberlangsungan sumberdaya perikanan,

1.1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota memiliki anggaran Rp 50.000.000 dengan realisasi Rp 48.762.125,-. Target kegiatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 508.916 kg tercapai 509.400 kg atau 100,09% dari target. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

1.1.1 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap memiliki anggaran sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi Rp 48.762.125,-. Target Sub kegiatan Jumlah benih ikan yang diperbantukan sebanyak 50.000 ekor terealisasi 145.050 ekor atau 290% dari target. Sub Kegiatan ini sendiri memiliki tujuan untuk

1. meningkatkan stok populasi ikan di perairan umum dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pengendalian dan pemanfaatan yang berpedoman pada kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya hayati perairan.
2. Untuk melestarikan sumberdaya ikan di perairan umum terutama ikan lokal
3. Untuk meningkatkan produksi ikan di perairan umum guna pemenuhan gizi bagi masyarakat.

4. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/nelayan di sekitar perairan umum melalui peningkatan pendapatan yang merata dan kesempatan kerja tambahan dari sektor perikanan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota TA. 2022 adalah sebagai berikut :

1. Metode pelaksanaan kegiatan adalah melalui kontraktual.
2. Pelaksanaan penyerahan hibah Jaring / Gillnet (Modifikasi) dan benih ikan untuk restocking dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022. Hibah ini diberikan pada 3 (tiga) kelompok perikanan perairan umum daratan yang sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan (proposal) serta telah di survey lokasi. Adapun penerima hibah adalah:

No.	Nama Penerima Kegiatan	Alamat	Jenis Bantuan	Volume
1.	Kelompok Mina Widas Mandiri	Desa Pajaran Kec. Saradan	Benih Ikan Tawes Benih Ikan Tombro Jaring/gillnet (Modifikasi)	26.350 ekor 22.000 ekor 5 unit
2.	Kelompok Setyo Manunggal	Desa Sugihwaras Kec. Saradan	Benih Ikan Tawes Benih Ikan Tombro Jaring/gillnet (Modifikasi)	26.350 ekor 22.000 ekor 5 unit
3.	Kelompok Dawuhan	Desa Sidomulyo Kec. Wonoasri	Benih Ikan Tawes Benih Ikan Tombro Jaring/gillnet (Modifikasi)	26.350 ekor 22.000 ekor 5 unit

II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki anggaran Rp 220.000.000,- dan terealisasi Rp 204.530.000,- dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya. Dari Target 1% terealisasi 1,04% atau 104% dari target. Target tersebut tercapai tak lepas dari kegiatan yang dilakukan yaitu :

II.1 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan memiliki anggaran Rp 220.000.000,- dan terealisasi Rp 204.530.000,- dengan target indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebanyak 3.614.774 kg terealisasi 3.649.100 kg atau 100,95%. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan yaitu :

II.1.1 *Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp Rp 220.000.000,- dan terealisasi Rp 204.530.000,- dengan target indikator Jumlah penyediaan pakan ikan di UPT sebesar 1 paket dan

teralisasi di angka yang sama, ini berarti target terealisasi sebesar 100%. Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Meningkatkan produksi benih baik jumlah kualitas maupun keragaman jenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan kegiatan UPTD Budidaya Ikan Air Tawar dan Kelompok Perikanan berwawasan lingkungan dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan serta pengendalian hama penyakit.
- c. Meningkatkan kemampuan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan secara berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pengolah dan pemasar secara berkelanjutan

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota mengacu pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan metoda Pengadaan langsung dan swakelola.

Mekanisme Pengadaan Langsung digunakan dalam Pengadaan Pakan Ikan sebanyak 100 zak dan Pakan Benih Ikan sebanyak 20 zak. Dengan Pemanfaatan Pakan :

- UPT Budidaya Ikan Air Tawar Sumbermoro Kecamatan Jiwan sebanyak : 40 zak pakan induk dan 8 zak pakan benih
- UPT Budidaya Ikan Air Tawar Doho Kecamatan Dolopo sebanyak : 60 zak pakan induk dan 12 zak pakan benih.

Selain itu Pengadaan Isi Tabung Oksigen sebanyak 11 tabung serta Plastik Packing Ikan serta bantuan hibah uang untuk:

1. Kelompok Ikan Maju Makmur

Alamat : Desa Geger Kecamatan Geger

Pemanfaatan : Bantuan Pemberdayaan Benih, Pakan dan Kolam

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

2. Kelompok Ikan Mina Barokah

Alamat : Desa Ketandan Kecamatan Dagangan

Pemanfaatan : Bantuan Pemberdayaan Benih, Pakan dan Kolam

Anggaran : Rp. 45.000.000,-

3. Kelompok Tani Kedung Tani

Alamat : Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo

Pemanfaatan : Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan

Anggaran : Rp. 60.000.000,-

4. Paguyuban Krida Taruna

Alamat : Desa Karangrejo Kecamatan Wungu

Pemanfaatan : Bantuan Kelompok Usaha Lele dan Ikan Konsumsi

Anggaran : Rp. 15.000.000,-

III. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan memiliki anggaran Rp 130.000.000,- dan terealisasi Rp 63.232.040,- dengan target indicator Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan sebesar 2% terealisasi 30,06%. Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

III.1 *Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*

Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota memiliki anggaran Rp 130.000.000,- dan terealisasi Rp 63.232.040,- dengan target indicator Jumlah UMKM pengolahan ikan sebanyak 15 unit usaha terealisasi sebanyak 16 unit usaha atau 106,67% dari target. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

III.1.3 *Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp 130.000.000,- dan terealisasi Rp 63.232.040,- dengan target indikator Jumlah Produk Olahan Ikan 10.400 kg teralisasi 13.334 kg atau 128,21% dari target.

Tujuan dari sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu PKK dalam hal penerapan teknologi pengolahan ikan
2. Memberikan wawasan baru kepada ibu-ibu PKK dengan berbagai macam aneka olahan ikan
3. Menghasilkan inovasi olahan berbasis ikan
4. Mempromosikan keanekaragaman menu masakan berbasis ikan kepada masyarakat luas
5. Menyebarluaskan informasi tentang ikan, jenis olahan masakannya, serta kandungan gizi dan manfaatnya kepada masyarakat luas
6. Mendukung upaya peningkatkan konsumsi ikan melalui Gerakan memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

Mekanisme pelaksanaan adalah kontraktual sederhana dengan metoda Penunjukan Langsung

1. Belanja Alat dan Bahan untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2022 (Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur)
2. Jasa Penyelenggara Acara pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2022 (Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur)

B. URUSAN PERTANIAN

IV. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian memiliki anggaran sebesar Rp 1.596.033.250,- dan terealisasi Rp 1.520.217.122,- atau 95,25%. Target indikator Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian 8,14% terealisasi 7,24%. Program ini didukung oleh :

IV.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian memiliki anggaran sebesar Rp 1.596.033.250,- dan terealisasi Rp 1.520.217.122,- atau 95,25%, dengan target indikator Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian yaitu 18 kelompok dengan realisasi sejumlah 16 kelompok atau 88,89% dari target. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

IV.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi memiliki anggaran sebesar Rp 600.000.000,- dengan realisasi Rp 588.554.280,- (98,09%). Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Tahun Anggaran 2022 memiliki 2 (dua) sumber anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DTU-DBH). Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi memiliki sumber dana yang berasal dari Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), dan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DTU DBH)

Pemanfaatan dana DBH CHT dilaksanakan melalui penyediaan bibit tanaman buah (bibit pisang raja, bibit alpukat, bibit jambu air dan bibit durian), sarana produksi pertanian berupa pupuk bokashi dan juga sarana budidaya perikanan (benih ikan lele, pakan ikan dan kolam terpal), hal ini bertujuan untuk;

- a. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani maupun pelaku agribisnis terhadap usaha serta budidaya tanaman buah - buahan dengan penerapan usahatani ramah lingkungan yang berbasis organik.
- b. Memotivasi dan menggerakkan petani dan pelaku agribisnis untuk mensukseskan upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura khususnya buah-buahan.
- c. Mengembangkan dan membentuk kawasan/sentra-sentra produksi yang sesuai dengan iklim setempat.
- d. Membantu mencukupi kebutuhan buah-buahan dalam negeri khususnya wilayah Madiun.
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengusaha tanaman yang bernilai ekonomis tinggi dan berjangka menengah/panjang.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan baik lahan kering maupun lahan pekarangan.
- g. Meningkatkan Kesehatan masyarakat ,meningkatkan kecerdasan dan mencegah stunting bagi balita dengan banyak mengkonsumsi protein hewani terutama dari ikan lele yang dibudidayakan di lahan yang dimiliki oleh petani tembakau.

Pemanfaatan dana DTU-DBH dilaksanakan melalui pembuatan demplot kacang hijau serta penyediaan sarana prasarana kebun bibit (pembuatan green house sederhana, pestisida, dan herbisida). Pembuatan demplot kacang hijau bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil produksi yang terbaik dari Benih Kacang Hijau bersertifikat dan tidak bersertifikat (lokal). Dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana kebun bibit diharapkan petani mampu jeli bertindak dalam hal budidaya tanaman buah melalui penggunaan Bibit Unggul dan pemanfaatan green house sederhana, sehingga secara langsung dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan produksi padi nasional sebagai upaya menuju swasembada.

Mekanisme pelaksanaan pada kegiatan dengan sumber dana DBHCHT dilaksanakan secara kontraktual yang mengacu pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan metoda Penunjukan Langsung serta Pengadaan langsung.

Pengadaan bibit dan pupuk bokhasi pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi diberikan kepada :

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Alpukat (btg)	Durian (btg)	Jambu Air (btg)	Pisang (btg)	Bokashi (kg)
1	Pilangkenceng	Pulerejo	Sotho Mulyo	-	-	200	100	6000
		Ngale	Sumber Rejeki	-	-	200	100	6000
		Ngale	Sumber Tani	-	-	200	100	6000
		Krebet	Tingkir Mulyo	-	-	200	100	6000
		Krebet	Rukun Makmur	-	-	200	100	6000
		Kedungrejo	Sido Mulyo	-	-	200	100	6000
2	Saradan	Pajaran	Sekar Slamet	-	-	200	100	6000
3	Kare	Bodag	Murah Sandang	210	-	-	-	4.200
		Cermo	Mugi Lestari	210	-	-	-	4.200
4	Gemarang	Durenan	Mekar Sari	-	210	-	-	4.200
	Jumlah			420	210	1.400	700	54.600

Pengadaan kolam terpal, benih ikan lele dan pakan ikan pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi diberikan kepada :

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Kolam terpal (unit)	Benih Ikan (ekor)	Pakan Ikan - 2 (zak)	Pakan Ikan - 3 (zak)
1	Pilangkenceng	Pulerejo	Sotho Mulyo	7	7.000	14	7
		Ngale	Sumber Rejeki	7	7.000	14	7
		Ngale	Sumber Tani	7	7.000	14	7
		Krebet	Tingkir Mulyo	7	7.000	14	7
		Krebet	Rukun Makmur	7	7.000	14	7
		Kedungrejo	Sido Mulyo	7	7.000	14	7
2	Saradan	Pajaran	Sekar Slamet	5	5.000	10	5
3	Kare	Bodag	Murah Sandang	7	7.000	14	7
		Cermo	Mugi Lestari	7	7.000	14	7
4	Gemarang	Durenan	Mekar Sari	5	5.000	10	5
	Jumlah			66	66.000	132	66

Selain pengadaan sarana produksi pertanian, juga dilaksanakan kegiatan pertemuan sebanyak 3 kali yaitu pertemuan sosialisasi, pertemuan evaluasi dan pertemuan penguatan data produksi pertanian yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

Pertemuan Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022 dengan peserta berjumlah 54 orang yang terdiri dari Kelompok Penerima Bantuan, Penyuluh Pertanian, Koordinator Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Petugas dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas tentang regulasi terkait bantuan dari dana DBHCHT serta arahan tentang hak dan kewajiban bagi calon penerima bantuan yang disampaikan oleh 2 orang nara sumber yang berasal dari Inspektorat dan Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Madiun.

Pertemuan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022 dengan peserta berjumlah 46 orang yang terdiri dari Kelompok Penerima Bantuan, Penyuluh Pertanian, Koordinator Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Petugas dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Pada pertemuan tersebut dilakukan evaluasi penyaluran bantuan kepada kelompok penerima serta kendala dan masalah yang dihadapi selama proses penyaluran bantuan. Hasil evaluasi menunjukkan penyaluran bantuan sudah dilaksanakan 100% sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

Pertemuan Penguatan Data Produksi dilaksanakan pada tanggal 2 Desember dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari Koordinator Penyuluh, Penyuluh Pertanian dan Petugas dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Dua orang perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun sebagai nara sumber pada pertemuan tersebut menyampaikan arahan tentang pentingnya akurasi data produksi pertanian dan perlu adanya perbaikan penghitungan data dengan menggunakan pengukuran objektif, teknologi terkini dan metodologi yang transparan.

Pelaksanaan Kegiatan dengan sumber dana DTU DBH yaitu Demplot Kacang hijau seluas 1 Ha dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Lokasi Demplot Kacang Hijau berada di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Gemarang. Sarana Produksi untuk kebutuhan demplot terdiri dari benih kacang hijau 40 Kg, NPK 100 Kg, Pestisida 3 liter, Pupuk Bokashi 1000 kg, 10 sachet rhizobium, serta didukung dengan biaya jasa tenaga teknis. Dana diberikan kepada penerima kegiatan demplot kacang hijau untuk dibelanjakan pembelian benih kacang hijau, saprodi, pembayaran belanja jasa tenaga teknis (upah tenaga tanam, upah pemeliharaan, upah panen).

Pemanfaatan dana DTU DBH juga dilaksanakan dalam bentuk Pembuatan Green House yang berlokasi di Kebun Jatisari, Desa Jatisari Kecamatan Geger serta penyediaan sarana dan prasarana kebun bibit dilaksanakan di kebun Dolopo, Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo yang keduanya merupakan bagian dari areal lahan UPT. Produksi Benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

Kegiatan pembuatan green house sederhana dilaksanakan pada rentang waktu 15 September 2022 sampai 09 November 2022, sedangkan untuk kegiatan pembelian

pestisida, herbisida dan pupuk bokashi dilaksanakan pada bulan september tahun 2022

dengan rincian :

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	PPN (%)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pupuk Bokashi	11.800 kg	1.000	11	13.098.000
2	Pestisida	74 liter	120.000	11	9.856.800
3	Herbisida	74 liter	124.000	11	10.185.360
				Jumlah	33.140.160

IV.1.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian memiliki anggaran Rp 996.033.250,- dengan realisasi Rp 931.662.842,- (98,09%). Target indikator Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian sebanyak 53 unit terealisasi 1.089 unit. Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian / Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau adalah :

- Menghasilkan produk yang berkualitas baik;
- Menekan kehilangan atau penurunan hasil;
- Meningkatkan efisiensi proses pascapanen tembakau;
- Memudahkan dalam pengangkutan hasil daun tembakau;
- Meningkatkan daya saing daun tembakau;
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau.

Mekanisme pelaksanaan sub Kegiatan ini adalah :

1. Sosialisasi Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau

Kegiatan sosialisasi penanganan panen dan pasca panen tembakau dilaksanakan pada tanggal 21-23 September 2022. Hari pertama dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022, dengan peserta sejumlah 50 orang petani tembakau dari Kec. Kare, Kec. Dagangan, Kec. Dolopo dan Kec. Gemarang. Hari kedua dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022 dengan peserta sejumlah 50 orang petani tembakau dari Kec. Pilangkenceng. Dan hari ke tiga dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 dengan peserta sejumlah 50 orang petani tembakau dari Kec. Mejayan, Kec. Balerejo dan Kec. Saradan.

Kegiatan sosialisasi penanganan panen dan pasca panen tembakau ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya dari Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), Dinas Perdagangan dan Koperasi serta dari Gudang PT. Sadana yang berada di Kabupaten Nganjuk.

2. Study Tiru Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau

Study Tiru dilaksanakan ke Kelompok Tani Among Tani III Dsn. Pringsewu Ds. Giripurno Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung dan gudang PT. Djarum yang ada di Kab. Temanggung

pada tanggal 11-12 Oktober 2022. Yang melakukan Study Tiru adalah petani tembakau dan petugas lapang Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Madiun serta Tim Sekretariat DBHCHT Kab. Madiun sejumlah 120 orang. Tujuan dari kegiatan Study Tiru ini adalah untuk mendapatkan informasi/ wawasan baik petani tembakau maupun petugas pertanian di Kabupaten Madiun terkait teknik penanganan panen dan pasca panen tembakau hingga pemasaran hasil tembakau yang tepat di wilayah tersebut.

3. Belanja Hibah Barang Alat Panen dan Pasca Panen Tembakau.

Anggaran untuk Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian / Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau dengan volume kegiatan hibah barang untuk penanganan panen dan pasca panen tembakau sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Generator	Mesin PEJARANG	Pisau PERAJANG	Terpal	Widik	Sorong	Timbangan DIGITAL	Tunel
1	PILANGKENCENG	PULEREJO	Sotho Mulyo	1	1	10	20	200	2	1	
2	PILANGKENCENG	NGALE	Sumber Rejeki	1	1	10	20	150	1	1	
3	PILANGKENCENG	NGALE	Sumber Tani	1	1	10	25	200	2	1	
4	PILANGKENCENG	PURWOREJO	Siswo Sejati	1							
5	PILANGKENCENG	KREBET	Rukun Makmur	1	1	10	15	150	1	1	
6	PILANGKENCENG	KEDUNGREJO	Sido Mulyo	1	1	10	15	150	1	1	
7	PILANGKENCENG	KEDUNGMARON	Rukun Makmur	1							
8	BALEREJO	BANARAN	Rantai Agung	1							
9	SARADAN	PAJARAN	Sekar Slamet				25		1		1
10	MEJAYAN	KALIABU	Suling Mas								1
11	KARE	BODAG	Murah Sandang				8		1		
12	KARE	CERMO	Mugi Lestari				20				3
13	KARE	MORANG	Tekad Makmur								1
14	KARE	RANDUALAS	Karyo Miguna								2
15	GEMARANG	DURENAN	Mekar Sari				5		1		
J U M L A H				8	5	50	153	850	10	5	8

V. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki anggaran Rp 9.850.252.263,- dengan realisasi Rp 9.614.939.687,-. Target indicator Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik sebesar 4% tercapai sebesar 4%. Program ini didukung oleh kegiatan :

V.1. Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki anggaran Rp 2.198.462.734,- dengan realisasi Rp 2.088.574.220,- (95%). Target indicator Jumlah prasarana pertanian yg

diperbantukan yaitu pupuk 39.533 kg dan bibit 1.621.158 batang dengan realisasi pupuk sebanyak 17.133 kg (43,34%) dan bibit sebanyak 767.610 batang (47,35%). Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

V.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian memiliki anggaran Rp 2.198.462.734,- dengan realisasi Rp 2.088.574.220,- (95%). Pemberian subsidi harga pupuk yang direncanakan tidak dilaksanakan karena terjadi perubahan harga yang menyebabkan anggaran yang ada tidak cukup untuk memenuhi pemenuhan subsidi secara layak, sehingga anggaran dialihkan untuk belanja lainnya yaitu untuk pembangunan BPP Jiwan, Pembangunan pagar kebun bibit Jatisari, serta biaya operasional kegiatan lomba masak bahan ikan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk target indikator Jumlah sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan alsintan (6 unit), jalan produksi (3 unit), jaringan irigasi (3 unit) terealisasi jumlah alsintan 15 unit, jalan produksi 3 unit, serta jaringan irigasi 2 unit.

V.2. Pembangunan Prasarana Pertanian

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian memiliki anggaran Rp 7.651.789.529,- dengan serapan anggaran Rp 7.526.365.467,- (98,36%). Target kegiatan Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik sejumlah 1.978 unit tercapai 1.978 unit (100%). Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

V.2.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani memiliki anggaran Rp 6.283.884.800,- terealisasi Rp 6.226544..550,- (99,09%). Target Sub Kegiatan Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara 10 unit tercapai dua kali lipat dari target yaitu 20 unit. Tujuan dari kegiatan ini diantaranya

Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani (jitut)

Kegiatan rehab jitu bertujuan untuk:

- Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tingkat usahatani (jitut)
- Meningkatkan areal tanam melalui penambahan indeks pertanaman dan produktivitas.
- Membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi yang telah direhabilitasi

Jalan usaha tani

Kegiatan jalan usaha tani bertujuan untuk:

- Memperlancar serta mempermudah transportasi dalam usaha tani;
- Mempermudah akses sarana dan prasarana pertanian.

Sarana dan prasarana pasca panen

Kegiatan sarana dan prasarana pasca panen bertujuan untuk:

- Mempercepat proses panen;

- Mengurangi biaya usaha tani (panen).

Rehabilitasi balai penyuluh pertanian

Kegiatan rehabilitasi balai penyuluh pertanian bertujuan untuk:

- Memberikan kenyamanan kepada penyuluh untuk memperlancar kegiatan penyuluhan;
- Memeberikan krlancaran pelayanan kepada poktan/gapoktan.

Mekanisme kegiatan mulai dari penyusunan usulan yang di input pada aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja, Sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem informasi kinerja merupakan tiga fondasi utama mengawal berjalannya anggaran negara secara akuntabel, serta peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah dalam proses *review*.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Paket	Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Volume	Nama Penerima	Nomor kontrak	Tanggal Kontrak
I	Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Pertanian	845.000.000	845.000.000				
1	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Ds. Sebayi Kec.Gemarang	190.000.000	190.000.000	1 unit	Kelompok Tani Karya Tani	521/853.1/402.109/ DAK/2022	5 April 2022
2	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Ds.Jatisari Kec. Geger	190.000.000	190.000.000	1 unit	kelompok Tani Dewi Sri I	521/853.2/402.109/ DAK/2022	5 April 2022
3	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Ds.Sareng Kec.Geger	190.000.000	190.000.000	1 unit	Kelompok Tani Sumber makmur II	521/853.3/402.109/ DAK/2022	5 April 2022
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds.Buduran Kec. Wonoasri	75.000.000	75.000.000	1 unit	Kelompok Tani Santoso	521/854.1/402.109/ DAK/2022	5 April 2022
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds.Kedungrejo Kec. Balerejo	100.000.000	100.000.000	1 unit	Kelompok Tani Rukun Mulyo	521/854.2/402.109/ DAK/2022	5 April 2022
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds.Tiron Kec. Madiun	100.000.000	100.000.000	1 unit	Kelompok Tani Nglegok Makmur	521/854.3/402.109/ DAK/2022	5 April 2022
II	Pembangunan Jalan Pertanian	3.500.000.000	3.500.000.000				

No	Paket	Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Volume	Nama Penerima	Nomor kontrak	Tanggal Kontrak
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Singgahsari Kec.Kebonsari	200.000.000	200.000.000	1 unit	Kelompok Tani Singgahsari	521/855.1/402.109/2022	5 April 2022
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Mojorejo Kec.Kebonsari	100.000.000	100.000.000	1 unit	Kelompok Tani Seneng Makmur	521/855.2/402.109/2022	5 April 2022
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Rejosari Kec.Kebonsari	150.000.000	150.000.000	1 unit	Kelompok Tani Ngudi Mulyo	521/855.3/402.109/2022	5 April 2022
4	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Balerejo Kec.Kebonsari	200.000.000	200.000.000	1 unit	kelompok Tani Among Tani	521/855.4/402.109/2022	5 April 2022
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Klorogan Kec.Geger	150.000.000	150.000.000	1 unit	Gapoktan Klorogan	521/855.5/402.109/2022	5 April 2022
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Dagangan Kec.Dagangan	150.000.000	150.000.000	1 unit	Kelompok Tani Bancong	521/855.6/402.109/2022	5 April 2022
7	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Wungu Kec.Wungu	100.000.000	100.000.000	1 unit	Kelompok Tani Raharjo	521/855.7/402.109/2022	5 April 2022
8	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Nglambangan Kec.Wungu	100.000.000	100.000.000	1 unit	Kelompok Tani Widodo	521/855.8/402.109/2022	5 April 2022
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Sobrah Kec.Wungu	100.000.000	100.000.000	1 unit	kelompok Tani Tani Makmur	521/855.9/402.109/2022	5 April 2022
10	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Pajaran Kec.Saradan	200.000.000	200.000.000	1 unit	kelompok Tani Tani Makmur	521/855.10/402.109/2022	5 April 2022
11	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Sambirejo Kec.Saradan	200.000.000	200.000.000	1 unit	kelompok Tani Margo Mulyo	521/855.11/402.109/2022	5 April 2022
12	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Kenongorejo Kec.Pilangkenceng	200.000.000	200.000.000	1 unit	Kelompok Tani Tirto Lancar	521/855.12/402.109/2022	5 April 2022
13	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Banyukambang Kec.Wonoasri	100.000.000	100.000.000	1 unit	Kelompok Tani Mardi Rahayu	521/855.13/402.109/2022	5 April 2022
14	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Balerejo Kec.Balerejo	150.000.000	150.000.000	1 unit	Kelompok Tani Cangkring I	521/855.14/402.109/2022	5 April 2022
15	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Bulakrejo Kec.Balerejo	100.000.000	100.000.000	1 unit	kelompok Tani Tani Among	521/855.15/402.109/2022	5 April 2022
16	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Tanjungrejo Kec.Madiun	150.000.000	150.000.000	1 unit	kelompok Tani Tani Makmur	521/855.16/402.109/2022	5 April 2022
17	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Banjarsari Kec.Madiun	150.000.000	150.000.000	1 unit	kelompok Tani Nugroho	521/855.17/402.109/2022	5 April 2022

No	Paket	Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Volume	Nama Penerima	Nomor kontrak	Tanggal Kontrak
18	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Gunungsari Kec.Madiun	100.000.000	100.000.000	1 unit	kelompok Tani Sari Makmur	521/855.18/402.109/2022	5 April 2022
19	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Rejosari Kec.Sawah	100.000.000	100.000.000	1 unit	kelompok Tani Rukun Makmur	521/855.19/402.109/2022	5 April 2022
20	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Cabean Kec.Sawah	200.000.000	200.000.000	1 unit	Kelompok Tani Tani Widodo	521/855.20/402.109/2022	5 April 2022
21	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Ds.Candimulyo Kec.Dolopo	250.000.000	250.000.000	1 unit	Kelompok Tani Jati Mulyo	521/856.1/402.109/2022	5 April 2022
22	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Ds.Tileng Kec.Dagangan	200.000.000	200.000.000	1 unit	Kelompok Tani Tani Makmur III	521/856.2/402.109/2022	5 April 2022
23	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Ds.Bolo Kec.Kare	150.000.000	150.000.000	1 unit	Kelompok Tani Maju Terus	521/856.3/402.109/2022	5 April 2022
III	Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan	902.220.000	869.800.000				
1	Combine Harvester Desa Kranggan Kec.Geger	451.110.000	434.900.000	1 unit	Kelompok Tani Koyo Mulyo II	602/2118/402.109/2022	6 Juli 2022
2	Combine Harvester Desa Duren Kec.Pilangkenceng	451.110.000	434.900.000	1 unit	Gapoktan Duren	602/2118/402.109/2022	6 Juli 2022
IV	Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan BPP Model dan Sarana Pendukungnya	798.000.000	792.866.850				
1	Balai Penyuluhan Kecamatan Saradan	200.000.000	198.460.000	1 unit		602.2/1927/e-pl/402.109/2022	27 Juni 2022
2	Balai Penyuluhan Kecamatan Madiun	200.000.000	198.800.000	1 unit		602.2/2021/e-pl/402.109/2022	30 Juni 2022
3	Balai Penyuluhan Kecamatan Wonoasri	200.000.000	199.000.000	1 unit		602.2/2022/e-pl/402.109/2022	30 Juni 2022
4	Balai Penyuluhan Kecamatan Mejayan	198.000.000	196.606.850	1 unit		602.2/1929/e-pl/402.109/2022	27 Juni 2022
	Menu Penunjang	238.664.800	218.880.700				
1	Belanja Fasilitator Lapangan	168.105.960	152.823.600	ob		188/816/kpts/402.109/2022	30 Maret 2022
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.830.000	6.780.000	oh			
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi	6.528.840	6.506.100	frekuensi			
4	Belanja Desain Perencanaan	32.000.000	31.625.000	paket		602.3/316/e-pl/402.109/2022	23 Februari 2022

No	Paket	Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Volume	Nama Penerima	Nomor kontrak	Tanggal Kontrak
5	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000	19.746.000	paket		602.3/1928/e-pl/402.109/2022	27 Juni 2022
6	Biaya Tender	4.200.000	1.400.000	Paket		188/440/kpts/402.109/2022	3 Februari 2022
	JUMLAH	6.283.884.800	6.226.547.550				

V.2.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya memiliki anggaran Rp 1.367.904.729,- terealisasi Rp 1.299.820.917,- (95,02%). Target indicator sub kegiatan Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik sebanyak 400 liter terealisasi 467 liter atau 118,75% dari target.

Maksud dan tujuan sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya adalah :

- Menyediakan Prasarana dan Sarana Penyuluhan Pertanian sehingga pelaksanaan penyuluhan pertanian bisa sesuai dengan yang diharapkan
- Meningkatkan peran dan fungsi Balai Penyuluh Pertanian dalam peningkatan produksi dan produktifitas pertanian.

Mekanisme kegiatan dilaksanakan secara kontraktual untuk:

1. Rehab Gedung BPP sebanyak 2 unit :
 - BPP Kecamatan Kare di Desa Kuwiran Kecamatan kare
 - BPP Kecamatan jiwon di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan
2. Pembangunan Pagar Kebun Bibit Bangunsari, Desa Bangunsari Kecamatan dolopo sebanyak 1 unit
3. Hibah Uang kepada 8 Kelompok Tani, dengan peruntukan sesuai dengan proposal yang disampaikan sebagai berikut:
 - PoktanLestari, Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Rp 50.000.000,- untuk pembelian genset
 - Poktan Mojo Mulyo, Desa Suluk Kecamatan Dolopo Rp 100.000.000,- untuk pembangunan balai pertemuan kelompok tani.
 - Poktan Koyo Mulyo II, Desa Kranggan Kecamatan Geger, Rp 50.000.000,- untuk pembangunan sumur sibel.
 - Poktan Kerta Boga II, Desa Kertosari Kecamatan Geger Rp 140.521.800,- untuk pengerasan jalan usahatani dan pembuatan talud jalan

- Poktan Usahatani, Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Rp 50.000.000,- untuk makadam jalan usahatani
- Kelompok Wanita Tani makmur, Desa Dagangan Kecamatan dagangan Rp 54.600.000,- untuk pembangunan sumur sibel
- Poktan Tani Maju, Desa Sirapan Kecamatan Madiun Rp 50.000.000,- untuk pembangunan jalan usahatani.

VI. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian memiliki anggaran Rp 548.000.000,- terealisasi Rp 535.898.100,- (97,79%). Target indikator Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian 99,05% tercapai 87,40% atau 87,84%. Program ini didukung oleh kegiatan :

VI.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian memiliki anggaran Rp 548.000.000,- terealisasi Rp 535.898.100,- (97,79%). Target indikator persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian 11,41% tercapai 68,92%. Besarnya capaian kegiatan ini karena adanya tambahan anggaran sebesar Rp 500.000.000,- yang berasal dari DAU untuk mengantisipasi gagal panen di lahan sawah seluas 5.865 ha di 6 kecamatan (Wungu, Mejayan, Wonoasri, Madiun, Balerejo, Sawahan) akibat asem-aseman (menurunnya kesuburan tanah akibat buruknya drainase sawah serta penggunaan pupuk Urea berlebihan)

VI.1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan memiliki anggaran Rp 548.000.000,- terealisasi Rp 535.898.100,- (97,79%). Target indikator Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati 45 kelompok terealisasi 272 kelompok.

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun Anggaran 2022 adalah:

- Melatih keterampilan dan pengetahuan petani terhadap upaya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan secara terpadu melalui penggunaan agen hayati (musuh alami).
- Memotivasi dan menggerakkan petani dan pelaku usaha pertanian untuk mensukseskan upaya swasembada beras dengan menjaga stabilitas produksi tanaman pangan.

- Mengembangkan dan membentuk petani mandiri yang dapat membuat agen hayati/musuh alami sebagai alternatif penggunaan pestisida kimia.
- Mengurangi biaya produksi melalui Pemanfaatan Dekomposer saat Pengolahan Lahan sehingga dapat mengurangi kebutuhan pupuk non Subsidi.
- Memperbaiki Struktur Fisik Maupun Kimia Tanah dengan pemanfaatan Dekomposer
- Mengurangi biaya produksi melalui pengendalian hama dan penyakit tanaman yang lebih ekonomis dan murah menggunakan agen pengendali hayati.
- Mengurangi kerusakan lingkungan dan lahan yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berbahaya.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota Gapoktan/Kelompok Tani melalui pemanfaatan pupuk organik dengan bantuan agensi hayati.

Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya berupa Pelatihan Pembuatan Agen Pengendali Hayati yang bersumber dari Dana DTU – DBH serta Bantuan Dekomposer dan Pertemuan dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Agens Hayati dilaksanakan di 3 lokasi dengan masing masing 3 kali pertemuan di tiap lokasi (jadwal dan tempat terlampir), dengan mengundang dua narasumber yaitu satu orang Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dari Satuan Tugas UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta satu orang praktisi pembuat agen hayati dari Klinik PHT Mekar Sari Kecamatan Dagangan.

Peserta terdiri dari petani dan kelompok tani penerima UPPO dan yang berminat dalam pembuatan agensi hayati. Peserta berjumlah 30 orang di setiap kecamatan. Pelaksanaan dilakukan pada bulan Mei - Juni 2022, kegiatan di masa pandemi tetap dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan covid-19.

Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Agensi Hayati dilaksanakan selama tiga kali pertemuan di masing-masing lokasi. Pertemuan pertama dilakukan penyampaian informasi dan cara pengendalian opt secara terpadu serta pelaksanaan praktik pembuatan agen hayati dengan bahan dasar larutan ekstrak kentang gula (ekg) sebagai media dan isolat bakteri sebagai biang untuk dikembangkan dan diperbanyak menjadi agen hayati pengganti insektisida.

Pertemuan Kedua dilaksanakan dengan jeda 2 minggu dari pertemuan pertama tujuannya agar agen hayati yang dibuat pada pertemuan pertama telah siap untuk diaplikasikan. Pada pertemuan ini petani melakukan praktek cara aplikasi agens hayati di lahan tanaman padi serta setelahnya dilakukan pembahasan kondisi lahan dan upaya penanganan OPT. Pertemuan minggu ketiga dilakukan pengamatan dari hasil aplikasi di lahan serta dilakukan pembentukan struktur kerja kelompok pembuat Agen Pengendali Hayati (APH) agar kegiatan tetap dapat berlanjut secara mandiri.

Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam pelaksanaannya berupa bantuan dekomposer dan Pertemuan Membedah Wawasan Petani Tentang Pengendalian OPT non-Pestisida yang dilaksanakan di 6 Kecamatan di Kabupaten Madiun (jadwal lokasi pelaksanaan terlampir).

Pertemuan Membedah Wawasan Petani Tentang Pengendalian OPT non-Pestisida dilaksanakan di 6 lokasi dengan masing masing 1 kali pertemuan di tiap lokasi (jadwal dan tempat terlampir), terdapat dua narasumber yaitu satu orang ASN pejabat fungsional Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dari Satuan Tugas UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta satu orang praktisi pembuat agen hayati dari Klinik PHT Mekar Sari Kecamatan Dagangan. Pertemuan bertujuan untuk memberikan wawasan kepada petani tentang manfaat dekomposer dan pengendalian OPT bisa dimulai sebelum olah tanah dan sebelum tanaman ada di lahan.

Bantuan dekomposer sejumlah 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) liter atau setara 5.865 ha disalurkan kepada 269 Kelompok Tani Penerima Bantuan yang berlokasi di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Wungu, Mejayan, Wonoasri, Madiun, Sawahan, dan Balerejo dengan rincian sebagai berikut.

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas Lahan (ha)	Volume (liter)
1	2	3	4	5	6
1	Wungu			200	800
		1 Mojopurno	1 Sri Murni	2	8
			2 Sri Rejeki	2	6
			3 Tani Jaya Baru	2	6
			4 Rukun Tani	2	8
			5 Tulodho Boga	3	10
			6 Sumber Tani	3	10
		2 Pilangrejo	7 Tunggal Jaya	3	12
			8 Rukun Makmur	3	12

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas Lahan (ha)	Volume (liter)
			9 Samekto	3	12
			10 Ngupoyo	3	12
	3	Munggut	11 Dewi Sri	4	16
			12 Flamboyan	3	12
			13 Tani Makmur	3	12
	4	Sidorejo	14 Lestari	3	12
			15 Wedari	3	12
			16 Sri Mulyo	3	12
			17 Sido Maju	3	12
	5	Brumbun	18 Purwo Asri	6	24
			19 Purwo Bangun	6	24
			20 Sukorejo	6	24
	6	Karangrejo	21 Ngudi Tani	4	16
			22 Sayuk Rukun	4	16
			23 Karangsemi	4	16
			24 Tani Mulyo	3	12
			25 Tumpeng Asri	3	12
	7	Nglanduk	26 Lestari	4	16
			27 Sri Mulyo	4	16
			28 Subur	4	16
	8	Mojorayung	29 Tani Makmur	5	20
			30 Karya Tani	5	20
			31 Sri Makmur	5	20
			32 Tani Jaya	5	20
	9	Wungu	33 Raharjo	6	24
			34 Karya Luhur	5	20
			35 Karya Bakti	2	8
			36 Kleco Rejo	5	20
			37 Iki Matih Sidomulyo	2	8
	10	Kresek	38 Sido Luhur	4	16
			39 Nedyo Rahayu	3	12
			40 Ambangun	4	16
			41 Tani Asih	3	12
			42 Sewu Tentrem	4	16
	11	Sobrah	43 Tani Makmur	4	16
			44 Rukun Tani	4	16
			45 Tani Mukti	4	16
	12	Nglambangan	46 Widodo	4	16
			47 Tani Maju	4	16
			48 Margo Luhur	4	16
	13	Tempursari	49 Adil Makmur	3	12
			50 Rohmat	3	12
			51 Rahayu	3	12
			52 Tani Makmur	3	12
	14	Bantengan	53 Tani Maju	3	12
			54 Tani Jaya	3	12

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas Lahan (ha)	Volume (liter)
			55 Argo Mukti	3	12
			56 Karya Mukti	3	12
2	Mejayan			1.000	4.000
		1 Kaliabu	1 Santoso	25	100
			2 Suling Mas	25	100
			3 Lestari	20	80
			4 Handayani	25	100
			5 Sri Rejeki	25	100
		2 Klecorejo	6 Klecotani	20	80
			7 Tirto Kencono	25	100
			8 Sri Mulyo	25	100
			9 Fajar Tani	25	100
		3 Blabakan	10 Rahayu	20	80
			11 Tani Agung	15	60
			12 Tani Maju	15	60
			13 Tani Makmur	20	80
		4 Wonorejo	14 Ngudi Makmur	25	100
			15 Sari Margo	20	80
			16 Karya Tani	33	132
		5 Kebonagung	17 Santoso Agung	25	100
			18 Jaya Agung	25	100
			19 Makmur Agung	25	100
			20 Sari Agung	25	100
		6 Darmorejo	21 Tani Makmur	30	120
			22 Edy Peni	25	100
			23 Sido Rukun	25	100
			24 Mekar Sari	30	120
		7 Kaligunting	25 Sumber Urip	25	100
			26 Pelita	30	120
			27 Gajah Arum	25	100
		8 Sidodadi	28 Sido Makmur	25	100
			29 Tani Jaya	25	100
			30 Edi Peni	25	100
			31 Watu Murni	25	100
		9 Kuncen	32 Sido Mukti	25	100
		10 Mejayan	33 Sri Rejeki	15	60
			34 Tunas Jaya	25	100
			35 Arum Dalu	30	120
			36 Dewi Sri	25	100
		11 Ngampel	37 Sido Muncul	25	100
			38 Sri Rejeki	20	80
			39 Mekar Sari	20	80
			40 Mawar	20	80
		12 Kel. Bangunsari	41 Tunas Harapan	25	100
		13 Kel. Krajan	42 Makmur	10	40
		14 Kel. Pandean	43 Wartu Sejati	7	28

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas Lahan (ha)	Volume (liter)
3	Wonoasri			300	1.200
		1 Purwosari	1 Dewi Sri	5	20
			2 Sumber Tani	10	40
			3 Rukun Makmur	10	40
			4 Madu Rekso	5	20
		2 Buduran	5 Tut Wuri	10	40
			6 Santoso	10	40
			7 Margo Makmur	10	40
			8 Sido Rukun	5	20
		3 Klitik	9 Adem Ayem	10	40
			10 Tulus Larasati	10	40
			11 Tunas Makmur	5	20
			12 Mawar	5	20
		4 Bancong	13 Mekar Sari	5	20
			14 Rukun Tani	10	40
			15 Tani Makmur	10	40
		5 Plumpungrejo	16 Rukun Tani	10	40
			17 Margo Tani	10	40
			18 Ngudi Sari	5	20
			19 Suko Karyo	5	20
		6 Sidomulyo	20 Agung Mulyo	10	40
			21 Tani Mulyo	10	40
			22 Budi Sari	10	40
		7 Ngadirejo	23 Seneng Makmur	10	40
			24 Margo Makmur	5	20
			25 Rejo Makmur	10	40
			26 Suko Makmur	10	40
		8 Jatirejo	27 Tani Mulyo	10	40
			28 Tani Rejo	10	40
		9 Banyukambang	29 Mardi Rahayu	10	40
			30 Sugih Waras	10	40
			31 Margo Utomo	5	20
			32 Pandan Arum	10	40
		10 Wonoasri	33 Sri Jaya	10	40
			34 Luhur	10	40
			35 Sri Rejeki	10	40
4	Madiun			1.500	6.000
		1 Sendangrejo	1 Gotong Royong	35	140
			2 Margo Rukun	44	176
		2 Dimong	3 Dadi Sari	44	176
			4 Sedyo suko	48	192
			5 Tani Makmur	39	156
		3 Dempelan	6 Sido Rukun	45	180
			7 Tani Makmur	30	120
			8 Usaha Molyo	15	60
		4 Sirapan	9 Tani Jaya	29	116

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas Lahan (ha)	Volume (liter)
			10 Tani Maju	28	112
			11 Tani Makmur	37	148
			12 Tani Sehat	26	104
		5 Betek	13 Tani Maju	26	104
			14 Tani Margo Mulyo	32	128
			15 Tani Pureng	27	108
		6 Bagi	16 Hasil Tani	4	16
			17 Tani Mulyo	23	92
			18 Tani subur	35	140
			19 Mina Padi	107	428
		7 Banjarsari	20 Ayam	41	164
			21 Nugroho	91	364
			22 Sampurno	42	168
		8 Nglames	23 karya tani	27	108
			24 Tani Bahagia	21	84
		9 Gunungsari	25 Sari Makmur	49	196
			26 Sari Mulyo	23	92
		10 Tiron	27 Nglegok Makmur	52	208
			28 Tiron Maju I	43	172
			29 Tiron Maju II	53	212
		11 Sumberejo	30 Sumber Jaya	38	152
			31 Sumber Rejeki	38	152
			32 Sumber Tani	35	140
		12 Tanjungrejo	33 Tani Luhur	22	88
			34 Tani Makmur	54	216
			35 Tani Mulyo	45	180
			36 Tani Rukun	42	168
		13 Tulungrejo	37 Margo Makmur	19	76
			38 Margo Rukun	19	76
			39 Ngudi Rejeki	32	128
			40 Tulung Rejeki	40	160
5	Balerejo			1.865	7.460
		1 Garon	1 Widodo	15	60
			2 Tani Makmur	15	60
			3 Sri Rejeki	15	60
			4 Sri Makaryo	15	60
			5 Sumber Makmur	15	60
			6 Dadi Makmur	15	60
		2 Balerejo	7 Cangkring I	40	160
			8 Cangkring II	40	160
			9 Ngudi ayam	40	160
		3 Kebonagung	10 Tani Maju I	21	84
			11 Tani Maju II	21	84
			12 Lembah Agung	21	84
			13 Sumber Agung	21	84
		4 Gading	14 Sumber Rukun	21	84

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas Lahan (ha)	Volume (liter)
			15 Sumber makmur	21	84
			16 Tani Utun	21	84
			17 Sumber Mulyo	21	84
		5 Sumberbening	18 Karang Mulyo	21	84
			19 Sumber Pangan	21	84
			20 Kali Bening	21	84
			21 Sumber Untung	21	84
		6 Bulakrejo	22 Tani Among	30	120
			23 Tani Makmur	30	120
			24 Tani jaya	30	120
		7 Tapelan	25 Ngudi Mulyo	40	160
			26 Ngudi Makmur	40	160
			27 Tani Makmur	40	160
		8 Babadan Lor	28 Ngudoyo Santoso	30	120
			29 Ngudoyo Mulyo	30	120
			30 Ngudoyo Makmur	30	120
			31 Ngudoyo Mukti	30	120
		9 Warurejo	32 Tani Maju	60	240
			33 Tani Mulyo	60	240
		10 Jerukgulung	34 Margo Santoso	45	178
			35 Rukun Makmur	45	178
		11 Kedungjati	36 Kedung Tani	40	160
			37 Kedung Mulyo	40	160
			38 Kedung Makmur	40	160
		12 Glonggong	39 Beno Raharjo	45	180
			40 Beno Makmur	45	180
			41 Beno Mukti	45	180
		13 Sogo	42 Tani Makmur	27	108
			43 Tani Lestari	27	108
			44 Tani Santoso	27	108
			45 Tani Membangun	27	108
			46 Tani Agung	27	108
		14 Banaran	47 Rantai Agung	45	180
			48 Rantai Lestari	45	180
		15 Pacinan	49 Cimahi Baru	30	120
			50 Cisdane Baru	30	120
			51 Citarum Baru	30	120
		16 Kedungrejo	52 Rukun Karyo	21	84
			53 Rukun Makmur	21	84
			54 Rukun Tani	21	84
			55 Rukun Mulyo	21	84
		17 Kuwu	56 Sumber Tani	30	120
			57 Sumber Jadi	30	120
			58 Sumber Makmur	30	120
			59 Sumber Rejeki	30	120
		18 Simo	60 Lestari Agung	30	120

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas Lahan (ha)	Volume (liter)
			61 Gawe Makmur	30	120
			62 Rukun Santoso	30	120
6	Sawahan			1.000	4.000
		1 Kanung	1 Karya Makmur	10	40
			2 Tani Harapan	10	40
		2 Pucangrejo	3 Usaha Tani	25	100
			4 Ngudi Luhur	25	100
			5 Tani Mulyo	33	132
		3 Rejosari	6 Dewi Sri	11	44
			7 Sri Mulyo	13	52
			8 Rukun Makmur	12	48
		4 Krokeh	9 Sidodadi	50	200
		5 Bakur	10 Elit Tani	26	104
			11 Setyo Rukun	10	40
			12 Mitro Tani	10	40
			13 Sri Sedono	10	40
		6 Cabean	14 Hasil Tani	45	180
			15 Tani Agung	58	232
			16 Tani Makmur	25	100
			17 Tani Widodo	30	120
		7 Sawahan	18 Mardi Laras	40	160
			19 Sari Wos	40	160
		8 Kajang	20 Setia Kawan	28	112
			21 Tani Utun	34	136
		9 Klumpit	22 Pangestu	47	188
			23 Tani Abadi	38	152
		10 Sidomulyo	24 Sinau Mulyo	84	336
			25 Margo Dadi	30	120
			26 Tani Jaya	16	64
		11 Lebakayu	27 Tani Rahayu	41	164
			28 Tani Mulyo	48	192
			29 Tani Maju	30	120
		12 Golan	30 Sumber Rejeki	35	140
			31 Sayuk Rukun	35	140
		13 Pule	32 Angudi Bogo	28	112
			33 Sumber Tani	23	92
JUMLAH				5.865	23.460

VII. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Program Penyuluhan Pertanian memiliki anggaran Rp 4.384.110.250,- terealisasi Rp 4.058.980.994,- (92,58%). Target indicator Persentase peningkatan kelas kelompok tani 7% terealisasi 7,67% atau 109,57% dari target. Program ini didukung oleh kegiatan :

VII. 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Rp 4.384.110.250,- terealisasi Rp 4.058.980.994,- (92,58%). Target indikator Jumlah peningkatan kelas kelompok tani 180 kelompok tercapai 197 kelompok atau 109,44% dari target

VII.1.1 *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa*
Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa memiliki anggaran Rp 200.000.000,- terealisasi Rp 197.873.390,- (98,94%) . Target Kegiatan Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek sebanyak 96 orang terealisasi 92 orang (98,97%).

Penggunaan Dana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian dan petani, kelompok tani atau Kelompok Wanita Tani dalam upaya meningkatkan produksi dan taraf hidup keluarga para petani. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa meliputi rapat koordinasi atau evaluasi koordinator penyuluh kecamatan terhadap kegiatan ataupun program-program daripada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, sarasehan petani milenial, program tingkat kecamatan, bimbingan teknis kelompok Unit Pengelola Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), Pelatihan Kelompok kerja 3 di kecamatan, bimbingan teknis penyuluh pertanian, tim penilai angka kredit, penghargaan kepada penyuluh dan petani berprestasi.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi pembiayaan:

a. Koordinasi dan Evaluasi Koordinator Penyuluh Kecamatan;

Koordinasi dan Evaluasi Koordinator Penyuluh Kecamatan dilaksanakan 9 kali dalam 1 tahun dengan peserta adalah coordinator Balai Penyuluhan Pertanian Lapangan yang terletak di tiap Kecamatan se Kabupaten Madiun. Koordinasi dan Evaluasi Koordinator Penyuluh Kecamatan dilaksanakan untuk sinkronisasi dan pembahasan persiapan kegiatan serta juga evaluasi terhadap program-program kegiatan Penyuluh pertanian dan juga kegiatan di bidang-bidang daripada dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

b. Sarasehan Petani Milenial;

Sarasehan petani milenial dibagi atas 5 tahap dimana setiap tahap pelaksanaan terdiri dari 3 kecamatan dengan 45 peserta. keseluruhan peserta yang mengikuti sarasehan petani milenial adalah 225 orang petani milenial yang tersebar se-Kabupaten madiun. Sarasehan petani milenial diperuntukan untuk menggali potensi-potensi pemuda dan pemudi milenial di Kabupaten Madiun yang bergerak di bidang pertanian untuk bertukar ilmu dan pengalaman-pengalaman untuk bersama-sama memajukan pertanian di Kabupaten Madiun

VII.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan

Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan memiliki anggaran Rp 705.000.000,- terealisasi Rp 697.754.254,- (98,97%). Target indikator 600 orang terealisasi 460 orang atau 76,67%.

Penganggaran Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT) Tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan Sekolah Lapang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pelatihan Tematik Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK-DBHCHT) di wilayah sentra-sentra tembakau dan petani tembakau serta pengembangan wilayah tembakau di wilayah Kabupaten Madiun.

Sekolah Lapang dilakukan dengan tujuan petani dapat memahami Good Agricultural Practice (SL-GAP) Tembakau secara mandiri dan diharapkan meningkatkan wawasan serta pemahaman para petani tembakau tentang budidaya tembakau, pembuatan pestisida nabati, pembuatan pupuk organik, Kredit Usaha Tani Tembakau, Persemaian dan pemilihan bibit tembakau, penentuan grade dan sortasi tembakau, Agroekologi tembakau, kesadaran hukum di masyarakat serta yang lain-lain. Sedangkan Pelatihan Tematik Petani Tembakau diharapkan para petani dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani tembakau dalam penerapan/pengembangan usaha budidaya tanaman Hortikultura, budidaya lele, pembuatan telur asin, budidaya ternak kambing, budidaya jambu air, dan pembuatan kripik pisang dan pelatihan tematik lainnya sebagai usaha lain di samping bertani tembakau.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi pembiayaan:

1. Sekolah Lapang Tembakau ;

Jumlah Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan untuk Sekolah Lapang Tembakau Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dimana Sekolah Lapang Tembakau dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan 27 Agustus 2022.

Dimana dalam setiap kelompoknya terdapat 30 orang petani tembakau dan buruh tani petani tembakau dari kelompok tani tembakau yang teralokasi. Terbagi atas 6 lokasi sekolah lapang tembakau atau 6 kelompok tani tembakau yang tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Gemarang terdapat 1 kelompok tani tembakau, Kecamatan Kare terdapat 1 kelompok tani tembakau, Kecamatan Pilangkenceng terdapat 4 kelompok tani tembakau :

NO	KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	LUAS (Ha)
1	Murah Sandang	Ds. Bodag Kec. Kare	Hari Kusdanto	10
2	Mekar Sari	Ds. Durenan Kec. Gemarang	Siran	3
3	Sotho Mulyo	Ds. Pulerejo Kec. Pilangkenceng	Sukimin	8
4	Sumber Rejeki	Ds. Ngale Kec. Pilangkenceng	Gatot Santoso	10,2
5	Rukun Makmur	Ds. Kreet Kec. Pilangkenceng	Tri Adi Sunu	10,25
6	Sidomulyo	Ds. Kedungrejo Kec. Pilangkenceng	Saridjan	10

Sekolah lapang tembakau dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan atau 15 materi sekolah lapang yang diberikan kepada peserta, adapun materi - materi pelajaran sekolah lapang tembakau adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah Lapang Penerapan Penyakit Hama Tanaman Tembakau;
- b. Sekolah lapang Dinamika Kelompok Perkebunan di Kabupaten Madiun;
- c. Sekolah lapang Pupuk dan pemupukan tembakau;
- d. Sekolah lapang Pembuatan pestisida nabati;
- e. Sekolah lapang Managemen Agribisnis;
- d. Sekolah lapang Pengolahan lahan dan irigasi tembakau;
- f. Sekolah lapang Penggunaan Dana Cukai bagi Kesejahteraan masyarakat;
- g. Sekolah lapang Edukasi Hukum bagi masyarakat;
- h. Sekolah lapang Agroekologi Tembakau;
- i. Sekolah lapang Membangun strategi pemasaran tembakau di era industri 4.0;
- j. Sekolah lapang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani;
- k. Sekolah lapang Persemaian dan Pemilhan Bibit Tembakau;
- l. Sekolah lapang Puggel, wiwil dan pasca panen;
- m. Sekolah lapang Penentuan Grade dan Sortasi Tembakau;
- n. Sekolah lapang Packing dan pemasaran.

Untuk narasumber Sekolah Lapang antara lain praktisi, pelaku usaha, PERHIPTANI, Universitas Merdeka Madiun, Bank BNI '46, PT Agrofarm Nusa Raya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Madiun, Kejaksaan Negeri Madiun dan PT Sadana Arif Nusa Nganjuk dan lain-lainnya.

2. Pelatihan Tematik ;

Jumlah Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan untuk Pelatihan Tematik Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT) adalah Rp. 405.000.000,- (Empat Ratus Lima Juta Rupiah) dimana Pelatihan Tematik Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT) dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan 2 Desember 2022.

Dimana dalam setiap kelompoknya terdapat 35 orang petani tembakau dan buruh tani petani tembakau dari kelompok tani tembakau yang teralokasi. Terbagi atas 8 lokasi sekolah lapang tembakau atau 8 kelompok tani tembakau yang tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Gemarang terdapat 1 kelompok tani tembakau, Kecamatan Kare terdapat 3 kelompok tani tembakau, Kecamatan Pilangkenceng terdapat 2 kelompok tani tembakau, Kecamatan Mejayan terdapat 1 kelompok tani tembakau dan Kecamatan Balerejo terdapat 1 kelompok tani tembakau :

No	Kelompok Tani	Alamat	Ketua	Luas (Ha)
1	Suling Mas	Ds. Kaliabu Kec. Mejayan	Dwi Ciptono	5
2	Rantai Agung	Ds. Banaran Kec. Balerejo	Sujarwo	1,5
3	Rukun Makmur	Ds. Kreet Kec. Pilangkenceng	Tri Adi Sunu	10,25
4	Siswo Sejati	Ds. Purworejo Kec. Pilangkenceng	Purwanto	3
5	Mekar Sari	Ds. Durenan Kec. Gemarang	Siran	3
6	Murah Sandang	Ds. Bodag Kec. Kare	Hari Kusdanto	10
7	Mugi Lestari	Ds. Ceremo Kec. Kare	Didik	10
8	Tekad Makmur	Ds. Morang Kec. Kare	Sunarto	10

Pelatihan Tematik PAK DBHCHT tembakau dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan atau 15 materi Pelatihan Tematik Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT) yang diberikan kepada peserta, adapun materi - materi pelajaran Pelatihan Tematik Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT) adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Tematik Teknik Perbenihan Hortikultura;
- b. Pelatihan Tematik Teknik budidaya tanaman hortikultura jambu air;
- c. Pelatihan Tematik Teknik budidaya tanaman hortikultura pisang;
- d. Pelatihan Tematik Teknik Budidaya Lele;
- e. Pelatihan Tematik Fermentasi pakan ikan dan aplikasi probiotik;

- d. Pelatihan Tematik Pemilihan Benih Perikanan;
- f. Pelatihan Tematik Teknik pembuatan keripik pisang;
- g. Pelatihan Tematik Panen dan pasca panen melon;
- h. Pelatihan Tematik Pembuatan telur asin;
- i. Pelatihan Tematik Budidaya Ternak Kambing;
- j. Pelatihan Tematik Pembuatan silase dan amoniasi jerami;
- k. Pelatihan Tematik Pembuatan Pupuk "Kohe";
- l. Pelatihan Tematik Budidaya Budikdamber;
- m. Pelatihan Tematik Manajemen Pemasaran;
- n. Pelatihan Tematik Manajemen Ekonomi Pertanian.

Untuk narasumber Sekolah Lapang antara lain praktisi, pelaku usaha, PERHIPTANI, Universitas Merdeka Madiun, Unit Pelayanan Terpadu Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Surabaya, PT Agrofarm Nusa Raya, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dan PT Sadana Arif Nusa Nganjuk dan lain-lainnya.

VII.1.3 *Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian memiliki anggaran Rp 106.500.000,- terealisasi Rp 95.490.000,- (89,66%). Target indikator Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian 75% terealisasi 75% atau 100% dari yang ditargetkan. Penggunaan Dana pendataan Pertanian bertujuan untuk pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat. Adapun maksud daripada Kegiatan Pendataan Pertanian adalah untuk penguatan data base capaian produksi pertanian yang terukur dan real time, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pertanian.

Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2022 meliputi pembiayaan:

- a. Pembelian paket data di BPP;

Paket data atau pulsa yang digunakan oleh admin laporan pertanian sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 12 bulan. Paket data atau pulsa digunakan untuk menginput data - data yang dihimpun oleh Petugas penyuluh Lapangan di wilayah kerja BPP tersebut.

Lokasi Kegiatan berada Balai Penyuluhan Pertanian dan Perikanan (BPP) yang tersebar di 15 Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan di Kabupaten Madiun yaitu :

No.	Nama BPP	Nama Petugas Admin	Paket data/bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket.
1	BPP Gemarang	Dhevi Aprilia Marsha, SP	250.000	3.000.000	PNS III
2	BPP Saradan	Yoyok Triono	250.000	3.000.000	PNS II
3	BPP Pilangkenceng	Sri Maryanto	250.000	3.000.000	P3K IX
4	BPP Mejayan	Heri Maulana Herlambang, SP	250.000	3.000.000	P3K IX
5	BPP Balerejo	Yeni Supriati, SP	250.000	3.000.000	P3K IX
6	BPP Wonoasri	Ixsanudin, SP	250.000	3.000.000	P3K IX
7	BPP Wungu	Desy Khalimatus Sa'diyah	250.000	3.000.000	PNS II
8	BPP Sawahan	Syamsul Arifin, SP	250.000	3.000.000	PNS III
9	BPP Jiwan	Wando Handaru,	250.000	3.000.000	PNS III
10	BPP Madiun	Ignatius R. Herman S	250.000	3.000.000	P3K IX
11	BPP Kare	Ari Suryaningsih	250.000	3.000.000	PNS III
12	BPP Geger	Ulfah Yunia E	250.000	3.000.000	P3K IX
13	BPP Dagangan	Santy Siswoyo Putri	250.000	3.000.000	PNS III
14	BPP Kebonsari	Bambang Rian Minarso, SP	250.000	3.000.000	PNS III
15	BPP Dolopo	Projo Prasetyo	250.000	3.000.000	PNS III

b. Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian

Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian meliputi kegiatan di 15 BPP dengan peserta sebanyak 30 dengan sekali pertemuan.

NO	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi
1	25 Oktober 2022	Wungu	Perbanyak Trichoderma Sp
2	26 Oktober 2022	Gemarang	Pembuatan Pestisida Nabati
3	26 Oktober 2022	Pilangkenceng	Pembuatan Agens Hayati
4	27 Oktober 2022	Madiun	Pembuatan Agens Hayati dari Lecanicillum Leconi
5	28 Oktober 2022	Kare	Perbanyak Tricoderma
7	7 Nopember 2022	Sawahan	Pembuatan Bubur California
8	9 Nopember 2022	Wonoasri	Perbanyak Agens hayati

VII.1.3 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp 3.372.610.250,- terealisasi Rp 3.067.863.350,- (90,96%). Target indikator Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan sebanyak 20 SL terealisasi 100% (20 SL).

Maksud dan Tujuan IPDMIP antara lain:

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia:

Peningkatan kapasitas petani baik laki-laki maupun perempuan. Keterampilan petani akan ditingkatkan melalui berbagai inisiatif termasuk penyuluhan, Sekolah Lapangan

bagi Petani, Forum Berbagi Antar Petani, Kunjungan Antar Desa, Sekolah Bisnis Petani dan workshop Pemangku Kepentingan

Penerima manfaat ini kemudian mengadopsi praktek-praktek pertanian yang telah disempurnakan, rumahtangga akan mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan pertanian sebagai hasil dari peningkatan nilai dari produksi padi dan/atau tanaman bernilai ekonomi tinggi

b. Kesetaraan Gender:

Penerima manfaat langsung, termasuk anggota-anggota Poktan DI, diharapkan 30% di antaranya adalah perempuan dan kaum muda. Perempuan dan kaum muda di seluruh lokasi Proyek akan berperan sebagai agen perubahan bagi pembangunan sosial dan ekonomi

A. Penyediaan Honorarium Dan Biaya Operasional Staf Lapangan (New Staff Salary and Operating Cost)

Sebagai konsekuensi dari proses rekrutmen tenaga Staf Lapangan untuk mengatasi kekurangan jumlah penyuluh pertanian di lokasi IPDMIP oleh DPIU, maka proyek berkewajiban menyediakan honorarium dan biaya operasional bagi tenaga Staf Lapangan yang direkrut tersebut. Penyediaan honorarium dan biaya operasional ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas Staf Lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan di lokasi Proyek IPDMIP dapat berlangsung secara efektif. Besaran honorarium dan biaya operasional yang diberikan kepada Staf Lapangan di kabupaten Madiun lokasi IPDMIP sebesar Rp. 2.000.000 /bulan selama 13 bulan dan biaya operasiona sebesar Rp.250.000 / bulan selama 12 bulan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku setempat.

Pelaksanaan fasilitasi pembayaran BOP kepada staf lapangan sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan kontrak kerja dan pelaksanaan tugas tenaga staf lapangan, DPIU melakukan pembayaran honorarium dan BOP setiap bulan;
- (ii) DPIU melakukan evaluasi kinerja staf lapangan yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan pembayaran honorarium bulan berikutnya;
- (iii) Honorarium bagi staf lapangan dibayarkan untuk 13 bulan , sedangkan BOP dibayarkan untuk 12 bulan.
- (iv) Besaran honorarium ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah, sedangkan besaran BOP ditetapkan sesuai dengan besaran BOP yang diberikan oleh Kementerian Pertanian.

A. SEKOLAH LAPANGAN PETANI (*Farmer Field Schools*)

Pelayanan IPDMIP akan mencakup daerah-daerah irigasi (DI) yang akan direhabilitasi melalui Proyek IPDMIP, baik DI kewenangan kabupaten maupun DI kewenangan provinsi dan DI kewenangan pusat yang ada di kabupaten lokasi Proyek IPDMIP. Petani-petani/anggota kelompok tani yang ada di desa-desa yang tercakup dalam DI tersebut, khususnya petani, kaum perempuan, dan petani muda/milenial akan memperoleh pelayanan penyuluhan melalui Proyek IPDMIP. Dukungan penyuluhan tersebut, di antaranya diselenggarakan melalui Sekolah Lapangan Bagi Petani. Sekolah Lapangan adalah proses pembelajaran non-formal bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, identifikasi masalah dan pemecahannya, mengambil keputusan, menerapkan praktek-praktek budidaya dan manajemen risiko yang lebih baik. Sekolah Lapangan dirancang sedemikian rupa sehingga kesempatan belajar petani terbuka selebar-lebarnya agar para petani berinteraksi dengan realita mereka secara langsung, serta menemukan sendiri ilmu dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Proyek IPDMIP menyediakan kesempatan kepada para petani/anggota kelompok tani di daerah irigasi lokasi Proyek IPDMIP untuk menjadi peserta dan mengikuti Sekolah Lapangan (komoditas padi) sebanyak 2 kali selama masa Proyek IPDMIP, yakni 1 kali di musim hujan dan 1 kali di musim kemarau. Kegiatan Sekolah Lapangan, kegiatan Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani dan kegiatan Kunjungan Antar Desa merupakan tiga kegiatan yang saling berhubungan. Artinya tiga kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan urutan yang benar, yakni Sekolah Lapangan, Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani, dan Kunjungan Antar Desa. Melalui tiga kegiatan ini, Proyek IPDMIP berupaya untuk mendorong dan membiasakan petani melakukan “penyuluhan oleh petani ke petani” (farmer to farmer extension) sebagai sebuah proses untuk membekali para petani dengan kemampuan untuk berkembang menjadi penyuluh swadaya.

- (i) Pada tahap persiapan, penyuluh memfasilitasi pertemuan rembug awal dengan seluruh peserta SL untuk:
- Mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi para petani dalam pengelolaan usahatani
 - Menyepakati dan menetapkan secara partisipatif materi pembelajaran SL untuk 12 kali pertemuan, yang mencakup materi-materi yang paling relevan dan dibutuhkan petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam satu siklus budidaya padi atau tanaman bernilai ekonomi tinggi, mulai dari persiapan tanam sampai pasca panen, baik aspek teknis, pembiayaan, pengelolaan air, dan pasca panen;

- Menyetujui jadwal untuk 12 kali pertemuan pembelajaran SL dari setiap pelaksanaan unit SL (musim hujan dan musim kemarau, serta untuk unit SL tanaman bernilai ekonomi tinggi); - Menyetujui penggunaan lahan salah seorang petani peserta SL untuk ditetapkan sebagai laboratorium lapangan (LL) seluas 0,25 - 1 ha yang digunakan sebagai tempat pertemuan pembelajaran SL yang memerlukan kegiatan pengamatan, praktek, demonstrasi, atau pengujian lahan yang digunakan sebagai LL. Kebutuhan sarana produksinya (antara lain benih, pupuk dan obat-obatan pengendali OPT) dan biaya tanam (sistem Jajar Legowo) dapat dibiayai oleh Proyek. - Menyetujui pelaksanaan demonstrasi alat mesin pertanian (alsintan) yang diadakan oleh DPIU, pada salah satu jadwal pertemuan pembelajaran SL.
- (ii) Pertemuan pembelajaran SL diawali dengan mengadakan tes awal (pre-test) untuk mengetahui kondisi awal tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta SL sesuai dengan materi pembelajaran yang telah disepakati;
- (iii) Pertemuan pembelajaran SL dilakukan sebanyak 12 kali dengan materi pembelajaran dan jadwal sebagaimana telah disepakati dalam rembug awal;
- (iv) Pertemuan pembelajaran yang terakhir dilaksanakan bersamaan dengan saat panen sehingga sekaligus bisa dilakukan pengukuran hasil ubinan untuk mengetahui tingkat provitas yang dicapai. Sebelum pertemuan pembelajaran terakhir ditutup, dilakukan tes akhir (post-test) dengan memberikan pertanyaan yang sama dengan tes awal (pre-test
- (v) Dalam pelaksanaan SL di masa pandemi Covid-19, harus memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut, bila dipandang perlu dapat pula memodifikasi format pertemuan pembelajarannya sesuai dengan kondisi di masing masing desa.
- (vi) Pelaksanaan Sekolah lapang Tahap 1 dimulai bulan Pebruari 2022 sampai April 2022 sedangkan Sekolah Lapang tahap 2 dimulai bulan Agustus 2022 sampai bulan Oktober 2022
- (vii) Metode Pembelajaran dalam sekolah lapang mencakup Pree test, post test, penyampaian materi di kelas, Diskusi kelompok, Praktek Lapang dan pengamatan di petak LL
- (viii) Materi yang disampaikan antara lain
 1. Rembuk Awal
 2. Tanam jajar legowo
 3. Pembuatan pestisida nabati dan manfaat bagi tanaman
 4. Pembuatan Pupuk Bokashi dan manfaatnya pada Kesuburan Tanah

5. Pemanfaatan Urine sapi sebagai Pupuk Organik Cair
 6. Pemanfaatan Telur Keong Mas sebagai Zat Penambah Nutrisi Tanaman
 7. Ubinan
 8. PUTS (Perangkat Uji Tanah Sawah)
 9. Analisa usaha tani
 10. Seleksi Benih
 11. Pembuatan Persemaian kering
 12. Rantai nilai
- (ix) Materi yang disampaikan di Sekolah lapang tahap 2 yaitu
1. Rembuk Awal
 2. Literasi Keuangan
 3. Dampak Fenomena Iklim
 4. Ferinsa dan manfaatnya bagi tanaman
 5. Beauveria bassiana
 6. Bakteri Pengurai
 7. Bubur california
 8. MOL (Mikro Organisme Lokal)
 9. Pembuatan Agens Hayati Trichoderma (Stimulator Pertumbuhan Tanaman)
 10. Booster padi sebagai Penukai kebutuhan Hara Tanaman
 11. Light Trap sebagai perangkap serangga
 12. Ubinan

Lokasi Sekolah Lapang

NO	TAHUN	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA
1	2022	Propinsi/ Kedungrejo	Balerejo	Kedungjati
2			Balerejo	Balerejo
3			Balerejo	Sogo
4			Balerejo	Tapelan
5			Balerejo	Babadan Lor
6			Balerejo	Glonggong
7		Pusat/ SIM	Sawahan	Kanung
8			Sawahan	Lebakayu
9			Sawahan	Sidomulyo
10			Sawahan	Sawahan
11		Pusat/SIM	Jiwan	Sambirejo
12			Jiwan	Bedoho
13			Jiwan	Teguhan

NO	TAHUN	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA
14			Jiwan	Jiwan
15			Jiwan	Sukolilo
16		Kawung	Madiun	Tulungrejo
17		Craken	Dagangan	Banjarsari wetan/Kulon
18		Sareng	Geger	Jatisari
19		Sedah	Kebonsari	Kedondong
20			Kebonsari	Krandegan

Hasil :

1 . Sekolah lapang tahap !

- Efisiensi biaya produksi melalui penerapan teknologi yang dikenalkan selama proses sekolah lapang seperti persemaian kering, pembuatan pestisida Nabati, MOL, ekoenzim,POC dll
- Mulai muncul perubahan perilaku petani dalam berusaha tani sehingga sudah berorientasi pada keuntungan
- Dapat mengatasi kendala yang dialami pada setiap musim tanam seperti serangan opt yang dulunya diatasi dengan menggunakan pestisida kimia , dengan adanya sekolah lapang maka pengendalian sdh menggunakan pestisida nabati yang murah, mudah dibuat dan ramah lingkungan

2. Sekolah Lapang tahap 2

- * Secara kelembagaan sudah mulai muncul perencanaan kebutuhan sarana produksi yang mampu disediakan secara pribadi maupun kelompok dengan memanfaatkan bahan bahan baku yang tersedia disekitar mereka
- * Aplikasi teknologi yang diterima selama mengikuti sekolah lapang, seperti penerapan pembuatan persemaian kering, sudah mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia maupun pestisida kimia dan sedikit demi sedikit mulai mengarah ke pertanian organic

3. FORUM BERBAGI PENGALAMAN ANTAR PETANI (*Farmer to Farmer Knowledge Sharing Forums*)

Kegiatan ini merupakan salah satu metode penyuluhan dalam rangka memfasilitasi proses pembelajaran di antara petani, termasuk perluasan jangkauan penyuluhan kepada petani lain. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi dan berbagi pengalaman antar petani peserta Sekolah Lapangan (SL) dan petani lain yang tidak menjadi peserta Sekolah Lapangan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan proses adopsi teknologi di antara petani. Pokok bahasan dalam forum ini antara lain meliputi berbagai permasalahan yang ditemui selama mengikuti SL, rencana tindak lanjut setelah SL,

pembiayaan usahatani, organisasi petani . Kegiatan forum Berbagi Pengalaman dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan dengan jumlah peserta sebanyak 840 orang dengan setiap kali pertemuan dihadiri 70 orang peserta terdiri dari peserta petani dan petugas .

Pelaksanaan Forum Berbagi dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani pertemuan pertama

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Rabu, 18 Mei 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Desa Jatisari Kecamatan Geger

Peserta : 70 orang

Peserta kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri peserta SL dari desa 6 yaitu : Desa Sumberejo, Jatisari, Uteran, Geger, Pagotan, Dagangan dan Kepet

Materi : Persemaian Kering dan Pembuatan Booster

Hasil :

Penggunaan Bahan Kimia sebisa mungkin dikurangi penggunaan dalam budidaya tanaman padi, selain harga yang mahal juga akibat yang ditimbulkan kurang baik sehingga solusi yang perlu ditindaklanjuti yaitu penggunaan Zat Penumbuh tanaman (ZPT/ penambah nutrisi bagi tanaman) yang terbuat dari bahan-bahan sekitar kita seperti air kelapa, yakult, susu murni, telur ayam dan madu, selain harga murah juga petani bisa membuat sendiri. Untuk menekan biaya produksi maka penggunaan persemaian kering sangat membantu petani, selain mudah juga murah penerapannya.

Ilmu yang diperoleh selama kegiatan sekolah lapang dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan produksi lahan pertanian. Selain itu juga diharapkan petani yang mengikuti acara ini dapat menyalurkan ilmunya ke petani lain yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga ilmu yang bermanfaat ini dapat diterima dan diaplikasikan oleh semua petani.

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani pertemuan kedua

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Kamis, 19 Mei 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Ds Krandegan Kec. Kebonsari

Peserta : 70 orang

Peserta kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri Desa Krandegan, Kebonsari, Singgahan, Bacem, Balerejo, Slambur, Bangunsari

Materi : Pembuatan Persemaian Kering dan Seleksi Benih

Hasil :

1. Persemaian kering merupakan solusi bagi petani yang tidak mempunyai lahan yg luas utk pembuatan persemaian
Persemaian kering bisa dilakukan di pekarangan, halaman sehingga memudahkan petani unruk merawat dan bisa mengurangi biaya produksi
2. Seleksi benih dilakukan untuk mendapatkan benih yang bernas

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani pertemuan ketiga

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Jumat, 20 Mei 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Ds. Banjarsari Wetan Kec. Dagangan

Peserta : Peserta kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri desa Banjarsari wetan, Jetis, Sewulan, Sukosari, Kertosari, Purworejo, Nglandung

Materi : Pembuatan Ekoenzim

Hasil :

1. Ekoenzim berguna sebagai pupuk organik cair
Penggunaan kulit buah segar sebagai bahan baku pembuatan ekoenzim dicampur dengan tetes, dengan perbandingan 3;1;10 (3 khg kulit buah : 1 liter tetes : 3 liter air) difermentasi selama kurang lebih 3 bulan.
2. Ilmu yang diperoleh selama kegiatan sekolah lapang dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan produksi lahan pertanian. Selain itu juga diharapkan petani yang mengikuti acara ini dapat menyalurkan ilmunya ke petani lain yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga ilmu yang bermanfaat ini dapat diterima dan diaplikasikan oleh semua petani.

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani pertemuan keempat

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Senin, 23 mei 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Ds Sambirejo Kec. Jiwan

Peserta : 70 orang

Peserta dari kegiatan ini sebanyak 70 orang peserta yaitu dari Ds Sambirejo, Metesih, Bukur, Sukolilo, Dimong/ Sirapan, Sidomulyo, Rejosari

Materi : Persemaian kering dan seleksi benih

Hasil :

1. Persemaian kering merupakan solusi bagi petani yang tidak mempunyai lahan yg luas utk pembuatan persemaian. Persemaian kering bisa dilakukan di pekarangan, halaman sehingga memudahkan petani untuk merawat dan bisa mengurangi biaya produksi, disamping itu dengan melakukan persemaian kering bisa menekan biaya produksi

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani pertemuan kelima

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Ds Jiwan Kec. Jiwan

Peserta : 70 orang

Peserta dari kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri dari desa Jiwan, Grobogan, Wayut, Sambirejo, Kanung, Sendangrejo, Tulungrejo

Materi : Pupuk Organik cair (POC) dan Persemaian Kering

Hasil :

1. Pupuk Organik Cair merupakan pupuk organik yang dibuat dari urine, bisa urine sapi, kelinci dicampur dengan EM4
2. Persemaian kering merupakan solusi bagi petani yang tidak mempunyai lahan yg luas utk pembuatan persemaian

Persemaian kering bisa dilakukan di pekarangan, halaman sehingga memudahkan petani untuk merawat dan bisa mengurangi biaya produksi

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani Pertemuan keenam

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Rabu, 25 Mei 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Ds. Bedoho Kec. Jiwan

Peserta : 70 orang

Peserta dari kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri peserta dari desa Bedoho, Teguhan, Ngetrep, Jiwan, Golan, Lebakayu, Sawahan

Materi : Pupuk Organik Cair (POC) dan Persemaian Kering

Hasil :

1. Penggunaan pupuk kimia sebisa mungkin dikurangi penggunaan dalam budidaya tanaman padi, selain harga yang mahal juga akibat yang ditimbulkan kurang baik sehingga solusi yang perlu ditindaklanjuti yaitu penggunaan pupuk organik cair yang terbuat dari bahan bahan sekitar kita seperti urine sapi yang difermentasi dengan EM4, selain harga murah juga petani bisa membuat sendiri

2. Persemaian kering merupakan solusi bagi petani yang tidak mempunyai lahan yg luas utk pembuatan persemaian

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani pertemuan ketujuh

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Kamis, 2 Juni 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Desa Sidomulyo Kec. Sawahan

Peserta : 70 orang

Peserta dari kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri peserta dari desa Sidomulyo, Rejosari, Sawahan, Sendangrejo, Glonggong

Materi : Persemaian Kering dan Pembuatan Pupuk Organik cair (POC)

Hasil :

1. Pupuk Organik Cair merupakan pupuk cair yang pembuatannya dari urine sapi dibantu dengan Effective mikroorganisme (EM4) dimana pupuk ini merupakan pupuk yang terbuat dari bahan organik atau dari urine hewan .
2. Persemaian kering merupakan salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh petani dalam menekan biaya produksi, dimana persemaian kering bisa dilakukan ditempat yang tidak begitu luas seperti halaman rumah ataupun pekarangan. Selain itu pengamatan OPT bisa dilakukan sedini mungkin dan lebih mudah dalam pengamatan serangan opt dan pemeliharaan.

Persemaian kering bisa dilakukan di pekarangan, halaman sehingga memudahkan petani untuk merawat dan bisa mengurangi biaya produksi

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani Pertemuan kedelapan

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Jumat, 3 Juni 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Desa Tulungrejo Kec. Madiun

Peserta : Peserta dari kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri Desa Tulungrejo, Sirapan, Balerej, Kertosari dan Dimong

Materi : Pembuatan Pestisida Nabati dari daun sirsat ,rimpang jeringau (Dlingo) dicampur dengan bawang putih

Hasil :

1. Dengan semakin mahalnya pestisida kimia maka petani sedini mungkin mulai menggunakan pestisida Nabati yang dibuat dengan memanfaatkan dari daun sirsat ,rimpang jeringau (Dlingo) dicampur dengan bawang putih .

2. Pembuatan pestisida nabati ini bisa mengurangi dan menekan biaya produksi , selain itu juga menjaga keseimbangan alam.
3. Pestisida nabati dibuat dengan cara mencampur 1 rimpang daun jeringau, 1 genggam daun sirsat , 3 siung bawang putih yang ditumbuk terlebih dahulu sampai halus dan didiamkan selama 1 hari.

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani Pertemuan kesembilan

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Senin, 6 Juni 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Desa Sogo Kec. Balerejo

Peserta : 70 orang

Peserta dari kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri Desa Sogo, Banaran, Kedungrejo, Tanjungrejo, Sumberejo

Materi : Pembuatan MOL dan POC

Hasil :

1. MOL merupakan kumpulan mikro organisme yang bermanfaat sebagai starter dalam proses penguraian, pelapukan, dalam fermentasi bahan organik menjadi pupuk organik padat maupun cair
2. Pembuatan mol dilakukan untuk menggantikan pupuk kimia yg memanfaatkan bahan-bahan disekitar seperti kangkung, daun ketela dan daun pepaya serta dicampur juga dengan nanas yang difermentasi dengan gula merah dan air leri dan didiamkan selama dua minggu
3. Pembuatan MOL ini terbukti bisa mengurangi dan menekan biaya produksi , selain itu juga menjaga keseimbangan alam.
4. POC merupakan pupuk yang tersedia dalam bentuk cair yang dibuat dari proses fermentasi sisa tanaman, kotoran hewan sehingga menghasilkan nutrisi bagi tanaman
5. Begitu pula dengan penggunaan pupuk organik cair yang memanfaatkan urine sapi maupun urine kelinci yang bisa digunakan sebagai pupuk yang ramah lingkungan
6. POC selain murah, mudah dibuat juga tidak menyebabkan keracunan dan ramah lingkungan

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani Pertemuan kesepuluh

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Selasa, 7 Juni 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Desa Tapelan Kec. Balerejo

Peserta : 70 orang

Peserta dari kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri Desa Tapelan, Kuwu, Babadan Lor, Bulakrejo, Sumber bening

Materi : Seleksi Benih dan Persemaian Kering

Hasil :

1. Persemaian Kering dilakukan dengan menebar benih di Loyang maupun di atas plastik yang dibentangkan , sehingga tidak memerlukan lahan yang luas serta pemeliharannya cukup mudah
2. Seleksi benih digunakan untuk mendapatkan benih yang bernas, caranya dengan menaburkan gabah ke dalam air yang sudah dikasih garam dan telur dalam kondisi telur mengapung, sehingga gabah yang tenggelam merupakan benih padi yang bernas sedangkan yang mengapung merupakan bebih yang kurang bagus untuk dibuat persemaian.

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani Pertemuan kesebelas

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Rabu, 8 Juni 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Desa Glonggong Kec. Balerejo

Peserta : 70 orang

Peserta dari kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri Desa Glonggong, Warurejo, Tapelan, Kedungjati dan klumpit

Materi : Pembuatan Pestisida nabati

Hasil :

1. Dengan semakin mahalnya pestisida kimia maka petani sedini mungkin mulai menggunakan pestisida Nabati yang dibuat dengan memanfaatkan dari daun mimba , daun sirsat yang di campur dengan EM 4, air leri dan air kelapa yang difermentasi selama dua minggu.
2. Pestisida nabati menimbulkan bau yang menyengat yang sangat kuat sehingga bisa mengusir serangga

Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani Pertemuan keduabelas

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Jumat, 10 Juni 2022

Jam : 07.30 – selesai

Tempat : Desa Kanung Kec. Sawahan

Peserta : 70 orang

Peserta dari kegiatan ini sebanyak 70 orang terdiri Desa Kanung, Pule, Bakur, Cabean, Sogo dan Bedoho

Materi : Pembuatan MOL dari bonggol pisang

Hasil :

1. Bonggol pisang yang semula dikira tidak bermanfaat akan tetapi setelah dicampur dengan air leri , air kelapa dan gula merah akan menjadi zat yang bermanfaat bagi tumbuhan
2. Mol bisa digunakan sebagai pengganti pupuk kimia

VIII. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program pendukung seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan OPD. Program ini ditunjang oleh 4 (empat) kegiatan yang keseluruhannya merupakan kegiatan yang memuat urusan rumah tangga internal Dinas Pertanian dan Perikanan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta termasuk didalamnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan total anggaran Rp 14.585.054.685,- dengan realisasi sebesar Rp 14.054.734.960,- (96,36%)

3.2 PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

PERMASALAHAN

1. Berkurangnya ekosistem sawah yang merupakan salah satu dampak dari alih fungsi lahan pertanian yang mengancam ketersediaan pangan serta berkurangnya kesempatan petani untuk menggarap lahannya secara berkelanjutan.
2. Penurunan produksi padi yang disebabkan oleh serangan OPT (organisme pengganggu tumbuhan) yang terjadi di beberapa kecamatan. Tanaman padi di wilayah tersebut diserang virus kerdil yang disebabkan karena vektor wereng hijau dan wereng coklat.
3. Tingginya resiko gagal panen komoditas hortikultura akibat pengaruh iklim dan serangan hama penyakit serta sulitnya menjaga mutu pasca panen mengingat komoditas hortikultura tidak dapat disimpan lama dan sangat rentan rusak sehingga mengakibatkan harganya sangat fluktuatif
4. Kegiatan swakelola Dana Alokasi Khusus terkendala oleh ketersediaan dana yang bertahap mengakibatkan penyelesaian pekerjaan fisik terhambat.

5. Lemahnya kemitraan antara petani dan industri rokok sehingga petani mengalami kesulitan dalam pemasaran tembakau
6. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.
7. Minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah, manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang BPP serta minimnya fasilitas untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas penyuluh lapangan.
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya, tingginya harga pakan dan terbatasnya ketersediaan benih unggul.
10. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dikarenakan pelaku usaha perikanan budidaya (pembesaran dan pembenihan) adalah skala kecil/tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, SDM, jaringan teknologi dan pasar.
11. Belum optimalnya sarana tangkap (perahu) maupun alat tangkap (jaring, pancing, pelampung dan coolbox)
12. Belum optimalnya sarana pengawasan (perahu patroli) maupun peralatan penunjang pengawasan (pelampung dan head lamp)
13. Berkurangnya populasi ikan di perairan Darat akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
14. Masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan secara memadai serta belum terpenuhinya sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan

PENYELESAIAN MASALAH

1. Perlindungan terhadap lahan pertanian melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu program perlindungan terhadap 21.587 Ha lahan sawah untuk tetap berfungsi sebagai lahan pertanian tanaman pangan.
2. Pengendalian OPT melalui Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yaitu :
 - konsep agroekosistem, yaitu perpaduan interaksi komponen-komponen ekosistem pertanian ke dalam taktik pengendalian hama dengan menciptakan keseimbangan antara herbivora dan musuh alaminya .
 - konsep ambang pengendalian, yaitu pengendalian populasi hama/penyakit yang memerlukan tindakan secara kimiawi dengan mempertimbangkan jenis organisme sasaran, dengan pengaruh minimum terhadap manusia, hewan, serangga berguna dan kualitas lingkungan hidup.

- konsep pelestarian lingkungan, yaitu pengendalian OPT melalui pendekatan ekologis, artinya dalam upaya pengendalian OPT harus sekecil mungkin gangguannya terhadap lingkungan. Salah satunya melalui kegiatan pelatihan pembuatan agen hayati sehingga pengendalian OPT bisa dilakukan secara alami sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.
3. Peningkatan pengetahuan petani melalui bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil, dengan penerapan teknologi pasca panen yang baik dan pengolahan hasil yang tepat guna. Melalui upaya ini diharapkan petani dapat meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura yang dihasilkan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani.
 4. Kelompok tani pelaksana swakelola harus menyediakan modal secara mandiri untuk pelaksanaan kegiatan, berupa kas kelompok atau kerjasama dengan pihak desa
 5. Mendekatkan petani tembakau dengan pasar melalui Kerjasama dengan perusahaan mitra khususnya untuk tembakau Kasturi.
 6. Peningkatan penyuluhan kelembagaan petani.
 7. Menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan ,peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi jaringan pemasaran, serta meningkatkan pembinaan penyuluh terhadap kelembagaan petani untuk terus mendorong petani anggota di dalamnya menerapkan GHP GAP, memperhatikan kualitas produk, dan memberikan jaminan mutu hasil pertanian.
 8. Peningkatan sarana dan prasarana BPP serta mengkomodir peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas melalui berbagai kegiatan.
 9. Optimalisasi perikanan budidaya melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan
 10. Peningkatan produktifitas perikanan budidaya melalui pelatihan pembesaran ikan dan pelatihan pembenihan ikan
 11. Optimalisasi sarana tangkap melalui bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap di perairan darat.
 12. Optimalisasi sarana pengawasan melalui bantuan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya ikan di perairan darat .
 13. Peningkatan populasi ikan perairan darat melalui bantuan restocking perairan umum darat (pud)
 14. Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan serta pemberian bantuan fasilitasi sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan

3.5 Tugas Pembantuan

B. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

a. Identifikasi Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantukan

No.	Pemberi Tugas Pembantuan/Penugasan	Urusan Pemerintahan	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan/ Penugasan
1.	Pemerintah Pusat	Pertanian	
2		Rehabilitasi jaringan irigasi tersier kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian (program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
3		Pembangunan embung kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas tahun	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
4		Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
5		Penyusunan e-rdtk untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
6		Verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
7		Kegiatan pengembangan irigasi perpipaan	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
8		Pengembangan tanaman kelapa genjah	Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian
9		Rawat ratoon kegiatan percepatan pencapaian swasembada gula konsumsi	Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian
10		Kegiatan Bantuan Benih Jagung Wilayah Khusus (<i>Realisasi Automatic Adjustment</i>)	Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
11		Pengelolaan Produksi Tanaman Kedelai	Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
12		Sarana Produksi Budidaya Porang	Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
13		Pengelolaan Produksi Budidaya Kacang Hijau	Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

b. Pelaksanaan

1. REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN (PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS)

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT)
- Meningkatkan areal tanam melalui penambahan indeks pertanaman dan produktivitas.
- Membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi yang telah direhabilitasi

Sasaran rehab JITUT adalah:

- Terehabilitasinya jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) dengan luas 500 Ha (13 kecamatan).
- Meningkatnya luas areal tanam melalui penambahan IP lebih dari 30% dan peningkatan produktivitas lebih dari 0.5 ton/ha.
- Terbangunnya rasa memiliki petani terhadap jaringan irigasi.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas TA 2022 di Kabupaten Madiun telah mencapai penyelesaian, baik fisik maupun keuangan. Adapun data selengkapnya sebagai berikut:

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT			Titik Koordinat	Target (m)	Realisasi (m)	Partisipasi (m)
		DESA	KECAMATAN	LU (Y)	LS (X)			
1	Kelompok Tani Wonoasri	Nglandung	Geger	-7,704822	111,513351	146	149,3	3,3
2	Kelompok Tani Krido Tani	Sangen	Geger	-7,685.831	111,533.379	135	136,7	1,7
3	Kelompok Tani Karya Makmur	Kebonsari	Kebonsari	-7,741.436	111,478.592	134	136,3	2,3
4	Kelompok Tani Sriket	Tambakmas	Kebonsari	-7,762.191	111,460.180	173	186,8	13,8
5	Kelompok Tani Ngudi Utomo	Banjarsari Kulon	Dagangan	-7,688.026	111,591.240	134	139,6	5,6
6	Kelompok Tani Tani Jaya	Prambon	Dagangan	-7,696.283	111,573.338	171	183,4	12,4

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT			Titik Koordinat	Target (m)	Realisasi (m)	Partisipasi (m)
		DESA	KECAMATAN	LU (Y)	LS (X)			
7	Kelompok Tani Rukun Tani	Bancong	Wonoasri	-7,563.117	111,632.305	150	154,9	4,9
8	Kelompok Tani Sido Muncul	Ngampel	Mejayan	-7,531.473,00	111,652.017	173	178,1	5,1
9	Kelompok Tani Tulodho Bogo	Mojopurno	Wungu	-7,660.740	111,574.532	142	146	4
10	Kelompok Tani Margo Makmur	Bibrik	Jiwan	-7,569.996	111,496.461	162	170,3	8,3
11	Kelompok Tani Rukun Tani	Bedoho	Jiwan	-7,577.609	111,486.942	123	124,8	1,8
12	Kelompok Tani Tani Makmur	Tapelan	Balerejo	-7,529.030	111,623.658	152	159,8	7,8
13	Kelompok Tani Sumber Untung	Sumber Bening	Balerejo	-7,553.802	111,610.549	162	173,6	11,6
14	Kelompok Tani Tani Makmur	Kradinan	Dolopo	-7,796456	111,537382	171	179	8
15	Kelompok Tani Sido Makmur	Pajaran	Saradan	-7,522126	111,7861997	150	160	10
16	Kelompok Tani Sido Luhur I	Sumber Bendo	Saradan	-7,47003489	111,76566909	152	155,6	3,6
17	Kelompok Tani Jatirejo	Tawangrejo	Gemarang	-7,633.115,00	111,692404	135	140,25	5,25
18	Kelompok Tani Tani Bahagia	Nglames	Madiun	-7,5930060	111,5401560	142	169,30	27,30
19	Kelompok Tani Sampurno	Banjarsari	Madiun	-7,595.899	111,555934	119	124,5	5,5
20	Kelompok Tani Slaji Makmur	Randualas	Kare	-7,7069266	111,6875347	68	68,70	0,70
Jumlah					2894,00		3036,95	142,95

Dari data tersebut di atas dapat terlihat bahwa target fisik kegiatan telah tercapai. Selain itu masyarakat di lokasi kegiatan juga telah memberikan partisipasi yang cukup besar berupa tenaga dan material sehingga kegiatan dapat terlaksana melebihi target yang telah direncanakan. Besarnya partisipasi masyarakat dapat terukur dari peningkatan hasil pekerjaan pasangan dari kegiatan Rehab JITUT sebesar 111 m.

2. PEMBANGUNAN EMBUNG KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS TAHUN

Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian bertujuan :

- a. Menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi, dan minum ternak).
- b. Meningkatkan Indeks Pertanaman dan atau produktifitas.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan Embung Pertanian merupakan kegiatan pembangunan baru untuk menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya yang dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi dan minum ternak).

a. Standar Teknis

1. Tersedianya sumber air baik berupa aliran permukaan dan atau mata air yang dapat ditampung atau dapat di alirkan ke lahan pertanian.
2. Untuk bangunan yang berfungsi menampung air (embung dan long storage), volume tampungan minimal 500m³.
3. Untuk bangunan yang berfungsi menahan dan menampung aliran air (dam parit) diupayakan debit minimal 5 lt/detik dan lebar penampang kurang lebih 5 m.
4. Diupayakan dapat memberikan suplesi air seluas 20 Ha untuk Sub Sektor Tanaman Pangan, 5 Ha Sub Sektor Hortikultura, 5 Ha untuk sub sektor Peternakan. 5 Ha untuk sub sektor Perkebunan.

b. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi

- a. Relative dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan suplementer/tambahan air irigasi atau daerah endemik kekeringan dan banjir.
- b. Diutamakan pada daerah cekungan, terdapat parit-parit

- c. Diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung harus dilapisi material geomembrane.
- d. Lokasi tempat Pengembangan Embung Pertanian status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.
- e. Untuk Sub Sektor Peternakan, dimanfaatkan terutama untuk Hijauan Pakan Ternak (HPT) serta sanitasi dan minum ternak.

2. Kriteria Penerima Bantuan

- a. Tergabung dalam wadah Kelompok tani/Gapoktan atau P3A yang mengusahakan lahan usaha tani dan memiliki pengurus yang aktif.
- b. Diutamakan kelompok tani/ Gapoktan atau P3A yang mempunyai semangat partisipatif.
- c. Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).

3. Tahapan Kegiatan

a. Persiapan

Meliputi pembentukan tim teknis, seleksi dan verifikasi CPCL, dan penetapan CPCL kegiatan yang ditetapkan oleh kepala dinas Kabupaten/Kota lingkup pertanian.

b. Survei, Investigasi dan Desain (SID)

SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang sesuai dengan kriteria dan pembuatan desain sederhana kegiatan Pengembangan Embung Pertanian.

- Verifikasi CPCL dilakukan oleh Tim Teknis.
- Pembuatan desain sederhana memuat :
 - Hasil verifikasi CPCL penerima bantuan.
 - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System/GPS, atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.
 - Gambar/sketsa/peta situasi lokasi sederhana.
 - Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).

C. Persyaratan Administrasi

- Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan Calon Penerima Bantuan kepada Kepala Dinas Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan KPA menetapkan usulan penerima bantuan.
- Pembukaan rekening atas nama UPKK Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah.
- Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK kelompok penerima bantuan.
- Penyusunan RUK dilaksanakan melalui musyawarah Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan hasil SID yang memuat rencana volume embung pertanian, kebutuhan bahan/material, sewa alat, tenaga kerja, kebutuhan biaya, sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim Teknis/ Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- Pengajuan pencairan dana bantuan tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK. Dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja yang telah disepakati. Pengajuan pencairan dana bantuan. Apabila pekerjaan fisik mencapai 50%, maka pengajuan pencairan dana Tahap II sebesar 30% bisa diajukan dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan dan dokumentasi progres pekerjaan.

d. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong. Tahapan pelaksanaan konstruksi adalah Pembersihan lokasi, Pembelian Bahan Material, Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja sesuai dengan RUKK ang disusun oleh kelompok tani

3. PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Upaya pengembangan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian.
2. Mengatasi kelangkaan tenaga kerja pertanian khususnya pra-panen.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang berujung pada peningkatan produktivitas serta penurunan biaya produksi.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di wilayah kerja UPJA, Poktan maupun Gapoktan.
5. Mengoptimalkan kinerja UPJA sebagai lembaga usaha alat dan mesin pertanian dari kegiatan jasa sewa, perbengkelan dan penjualan suku cadang alsintan.
6. Mendorong percepatan penumbuhan petani milenial.

Dasar Kegiatan

1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/Pl.130/5/2008 Tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian.

Sumber Dana

Anggaran Kegiatan untuk Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian ini senilai Rp. 15.000.000,- dari sumber dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Realisasi Keuangan

Dari Jumlah Anggaran senilai Rp. 15.000.000,- terserap Rp.14.754.500,-. Kegiatan ini dilaksanakan melalui monitoring pemanfaatan alsintan, pembinaan dan pelatihan kelembagaan UPJA, penginputan BAST, dan Pemeriksaan alsintan.

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Sosialisasi adalah 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Madiun, yaitu Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Wungu, Kecamatan Kare, Kecamatan Mejayan, Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun Kecamatan Jiwan dan Kecamatan Sawahan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan :

- a. Penetapan kriteria penerima bantuan perbengkelan Alat dan mesin Pertanian.
 1. UPJA atau Gapoktan memiliki potensi dalam perbengkelan alsintan.
 2. Lokasi di daerah sentra produksi tanaman pangan.
 3. Memfasilitasi UPJA maupun Gapoktan yang mengusulkan bantuan perbengkelan alat dan mesin pertanian.
- b. Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Alat Mesin Pertanian terdapat dukungan dana pendampingan bersumber dari dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa timur
- c. Pendampingan verifikasi Pengawasan Pemanfaatan Alsintan .

Melakukan Pendampingan verifikasi pengawasan pemanfaatan Alsintan supaya penyaluran alsintan yang berada di 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun sesuai dengan kriteria penerima tidak terjadi tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan, petani dan berada pada lokasi yang tepat dan benar benar dimanfaatkan dengan baik.

d. Memantau perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

e. Melaksanakan Pembinaan kelembagaan UPJA

Melakukan Pembinaan kepada Lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.

f. Melaksanakan Koordinasi Penyaluran BAST untuk memastikan bahwa penyaluran alsintan sudah beserta berita acara serah terima nya sudah lengkap diterima oleh kelompok penerima manfaat sesuai dengan CPCL.

g. Melaksanakan Monitoring pemanfaatan Alsintan ke 15 kecamatan

Monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan dan penyaluran bantuan alsintan dilaksanakan agar proses penyediaan dan penyaluran bantuan alsintan dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tahap perencanaan pengadaan, tahap pengadaan dan tahap penyaluran oleh petugas, petugas Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan alsintan sampai ke penerima manfaat. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan kebijakan di bidang alsintan.

4. PENYUSUNAN E-RDKK UNTUK PENDATAAN PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI

Tujuan dari Kegiatan ini adalah agar :

a. kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan riil sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi baik untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan peternakan dan pertambakan dalam suatu format RDKK.

b. Untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam menyusun RDKK kegiatan usahatani pada setiap musim tanam secara mandiri berkesinambungan

c. Menyiapkan perangkat RDKK guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya menurut azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, khususnya pada Lampiran II telah diatur mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Sumber Dana

Anggaran Kegiatan untuk Penyusunan E-RDCK ini senilai Rp. 181.955.000,- dari sumber dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Realisasi Keuangan

Dari Jumlah Anggaran senilai Rp. 181.955.000,- terserap Rp.181.459.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Perjalanan dalam rangka monitoring penginputan e alokasi. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani/kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usahatani secara berencana dengan azas musyawarah sehingga pengisian e alokasi akan menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran. Dalam penyusunan e alokasi pupuk bersubsidi kelompok tani agar dibimbing dan dibina oleh Petugas/Aparat Dinas Pertanian setempat. Hal ini merupakan tugas para penyuluh dan pembina lainnya untuk membuat skenario musyawarah kelompok tani, sehingga menghasilkan keputusan e Alokasi yang sesuai dengan rekomendasi anjuran teknologi spesifik lokasi.

Latihan tentang penyusunan e Alokasi ini perlu dilakukan dalam bentuk simulasi dan lain-lain pada pertemuan teknis Penyuluh pertanian atau pertemuan lainnya, agar dalam praktek di Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di lapangan dalam membimbing/membina Kelompok tani dapat berjalan lancar. RDKK selain berfungsi sebagai alat untuk perencanaan kebutuhan pupuk, juga dapat dijadikan sebagai penuntun perkiraan tanam dan panen di masing-masing wilayah. Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan e Alokasi terkait langsung dengan dukungan Kepala Desa/Lurah dan PPL/Koordinator PPL. Gerakan yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Mengadakan pertemuan dengan kontaktani/ketua kelompok tani yang ada di desanya untuk mengatur dan menetapkan jadwal musyawarah kelompok tani.
2. Menggerakkan petani/anggota kelompok tani supaya hadir dan aktif dalam musyawarah kelompok tani.
3. Secara pribadi atau mengutus pamong desa menghadiri musyawarah kelompok tani untuk menyusun e Alokasi.

4. Memberikan nasehat/bimbingan kepada anggota kelompok tani yang seringkali/selalu tidak hadir.
5. Melakukan pengawasan dengan memberikan koreksi (nasehat secara persuasif dan edukatif) kepada anggota - anggota kelompok tani yang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan e Alokasi Pupuk Bersubsidi pelaksanaannya menyimpang dari hasil kesepakatan musyawarah penyusunan e- Alokasi.

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Sosialisasi adalah 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Madiun, yaitu Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Wungu, Kecamatan Kare, Kecamatan Mejayan, Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun Kecamatan Jiwan dan Kecamatan Sawahan

Penyusunan e Alokasi Dan Rekapitulasi

Penyusunan e Alokasi dilakukan oleh kelompok tani dan setiap petani harus tercatat/terdaftar dalam Kelompok Tani.

Tahapan penyusunan e Alokasi / RDKK Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut:

- a. Pertemuan pengurus Kelompok Tani yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya.
- b. Pertemuan pengurus Kelompok Tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota Kelompok Tani tentang rencana kebutuhan Kelompok Tani.
- c. Musyawarah anggota-anggota Kelompok Tani dipimpin oleh Ketua dan/atau pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota Kelompok Tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan berdasarkan rekapitulasi.
- d. Penyuluh pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan riil.
- e. Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan diketahui oleh penyuluh pendamping.

Tahap Perbanyakan dan Pengiriman RDKK Proses pengadaan dan pengiriman RDKK sesuai kebutuhan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak (copy) rangkap 5 (lima) dan dikirim kepada Penyalur/Pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), Kepala Desa/Lurah, Penyuluh, Ketua Gapoktan dan Ketua Kelompok Tani
- b. RDKK disusun paling lambat awal bulan Februari

- c. RDKK dibuat rangkap 5 (lima), untuk : Pengecer pupuk bersubsidi resmi, Kepala Desa/Lurah, Ketua Gapoktan, Penyuluh dan arsip Poktan

RDKK dapat digunakan sebagai instrument pesanan pupuk bersubsidi dipenyalar/pengecer resmi. Tahap Rekapitulasi RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk

Tingkat Desa/GAPOKTAN:

- a. Pengurus Gapoktan membuat rekapitulasi RDKK setiap Poktan dalam satu Desa/Kelurahan dan ditandatangani Ketua Gapoktan
- b. Rekapitulasi RDKK diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah
- c. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat), untuk : BP3K, Penyuluh dan arsip Gapoktan

Tingkat Kecamatan:

- a. Penyuluh membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Kecamatan dan ditandatangani Kepala Koordinator Penyuluh/Kepala BP3K
- b. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala BP3K dan diketahui oleh Camat
- c. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat), untuk : Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, BP3K dan arsip
- d. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan disusun paling lambat bulan Maret.

Tingkat Kabupaten:

- a. Kepala Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten dan ditandatangani Kepala Dinas yang bersangkutan.
- b. Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten dibuat rangkap 4 (empat), untuk Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, Bakorluh dan arsip.
- c. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan disusun paling lambat bulan April.

5. VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI PROGRAM KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS (APBN-TP)

Tujuan dari Kegiatan ini adalah memverifikasi dan memvalidasi penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga proses penyalurannya transparan dan akuntabel. Sehingga penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021.
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020.

Sumber Dana

Anggaran Kegiatan untuk Penyusunan E-RDKK ini senilai Rp.216.060.000,- dari sumber dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Realisasi Keuangan

Dari Jumlah Anggaran senilai Rp. 138.800.000,- terserap Rp.138.320.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan melalui perjalanan dalam rangka mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk oleh tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan pelatihan tentang mekanisme verifikasi dan validasi pupuk kepada tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan, agar meminimalkan terjadinya penyelewengan penyaluran pupuk di tingkat petani.

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Sosialisasi adalah 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Madiun, yaitu Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Wungu, Kecamatan Kare, Kecamatan Mejayan, Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun Kecamatan Jiwan dan Kecamatan Sawahan

Mekanisme Pelaksanaan

1. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Alokasi Pupuk Bersubsidi Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak e-RDKK Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 41 Tahun 2021. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan Kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

2. Verifikasi dan Validasi Penyaluran

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) orang.
- b. Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
- c. Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/ Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II

3. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Hak

Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya;
- 2) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Tim Pembina

- 1) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi serta Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- 2) Tim Pembina berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

b. Kewajiban

Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi memastikan kebenaran data penyaluran pupuk.

Tim Pembina

- 1) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring dan pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang;
- 2) Membuat laporan hasil pembinaan;

3. Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani

Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Dashboard Bank dengan mengisi laporan sesuai Lampiran 6. Untuk wilayah yang menggunakan Kartu Tani Tim Verifikasi dan Validasi melakukan pengecekan terhadap data penebusan petani melalui Dashboard dan apabila ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan Verifikasi Lapangan.

Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan :

- a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada data Dashboard Bank maka dilakukan klarifikasi kepada kios pengecer dan petani.
 - b. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer.
4. Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan Kartu Tani

Langkah-langkahnya dalam penebusan pupuk bersubsidi belum menggunakan kartu tani sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

- 1) Kios Pengecer menyerahkan dokumen berupa :
 - a) Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
 - b) Data cetak e-RDKK
 - c) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi
 - d) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan
 - e) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer
 - f) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - g) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumendokumen
- 3) Hasil verifikasi dan validasi diinput melalui sistem eVerval.

2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

- 1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi
- 2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecerpengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi.
- 3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/ 4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
 - b. Data cetak e-RDKK;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan;
 - e. Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer;
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;

- g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
- h. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran
- i. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer
- j. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

6. KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPIPAAN

Maksud dan tujuan Kegiatan pengembangan irigasi perpipaan adalah :

- a. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan;
- b. Menekan angka kematian tanaman baru;
- c. Meningkatkan jumlah tanaman perkebunan
- d. Meningkatkan daya saing komoditi perkebunan;
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani perkebunan.

Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan dari Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Jawa Timur adalah :

- DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-018.08.4.059187/2021 tanggal 17 November 2021

Dana dan Sumber Anggaran

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Perkebunan Jawa Provinsi Timur Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mendapat anggaran senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Sumber anggaran Kegiatan ini dari APBN Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan mendapat anggaran senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dialokasikan antara lain untuk, belanja barang pengelolaan air irigasi untuk pertanian dan belanja barang untuk administrasi teknis Kabupaten.

Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan dengan volume kegiatan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	KETUA	PANJANG PIPA (meter)	JUMLAH.BAK PENAMPUNG (UNIT)
1.	Dagangan	Segulung	Bade Maju	Nyoto	1.875	2
2.	Gemarang	Batok	Tani Maju	Samsuri	1.875	2

7. PENGEMBANGAN TANAMAN KELAPA GENJAH

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. , Memberdayakan potensi Sumberdaya alam dan Sumberdaya manusia yang ada di masyarakat pedesaan, Mewujudkan sentra potensial alam yang mendukung di wilayah dataran tinggi.

Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022 dengan Kegiatan Pengembangan Kelapa Genjah di Kabupaten Madiun :

DIPA Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SP DIPA-018.05.2.567338/2022 Revisi ke 05 Tanggal 28 April 2022.

Dana dan Sumber Anggaran

Dana dan sumber anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022 dengan Kegiatan Pengembangan Kelapa Genjah di Kabupaten Madiun di Kabupaten Madiun bersumber dari anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.

Mekanisme Pelaksanaan

Pengajuan Usulan Kegiatan dari Kelompok Tani sampai Input ke E-Proposal

Kegiatan Pengembangan Kelapa Genjah di Kabupaten Madiun diawali dengan pengajuan proposal atau usulan kegiatan dari Gapoktan atau kelompok tani dengan mengetahui Kepala Desa setempat setelah itu dilanjutkan dengan input usulan pada E-Proposal. Setelah ada Rekom Kegiatan dari Ditjenbun dilanjutkan dengan Identifikasi CPCL, Pengambilan titik koordinat, Sosialisasi Kegiatan dan Pendampingan pada realisasi kegiatan sampai monitoring dan evaluasi.

Proses Identifikasi CPCL (Calon Petani Calon Lahan)

Kegiatan Pengembangan Kelapa Genjah di Kabupaten Madiun diawali dengan proses identifikasi CPCL (Calon Petani Calon Lahan) yang dilakukan dengan mengidentifikasi sesuai pengajuan Proposal Gapoktan/Kelompok Tani. Identifikasi CPCL dilakukan dengan survey lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinat. Dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi anatra Korluh pada BPP, Kepala Desa, serta dari Dinas Kabupaten untuk menentukan titik koordinat calon petani calon lahan pada kegiatan pengembangan tanaman kelapa Ta 2022.

Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Kelapa Genjah di Kabupaten Madiun

Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Kelapa Genjah di Kabupaten Madiun dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 dengan dihadiri dari Komisi IV DPR RI, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, Perwakilan Dinas Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Madiun, Bidang Perkebunan, serta Kelompok Tani penerima manfaat kegiatan yang ditunjuk.

Sosialisasi dari Komisi IV DPR RI mengharapkan dengan adanya kegiatan pengembangan tanaman kelapa Genjah di Kab Madiun bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar pada umumnya. Dengan Paket kegiatan berupa Bibit 22.000 batang dan Pembenah Tanah/Pupuk 2.000 Kg.

Pada Pertemuan sosialisasi tersebut disampaikan kepada Kelompok Tani dan perwakilan anggota poktan mengenai lingkup tanaman kelapa dari budidaya sampai panen.

Kelapa (*Cocos mucifera* L.) adalah komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tumbuhan ini di manfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga di anggap sebagai tumbuhan serta guna.

Morfologi Tanaman Kelapa Bagian-bagian dari pohon kelapa yaitu akar, batang, daun, bunga dan buah. Adapun rincian-rincian morfologi dari tanaman pohon kelapa yaitu sebagai berikut:

a. Akar

Akar kelapa merupakan akar serabut yang berjumlah sekitar 2000-4000 helai tergantung pada kesuburan tanah, iklim dan kesehatan tanaman. Bagian dasar dari batang kelapa bentuknya membesar, kemudian dibagian dalam tanah menciut lagi sehingga merupakan kerucut terbalik. Bagian ini di sebut “bole” atau “root bulb”.

b. Batang

Pada umumnya batang pohon kelapa tumbuh lurus ke atas, kecuali pada pohon kelapa yang tumbuh di tempat-tempat tertentu seperti di pinggir sungai, tebing dan lain-lainnya batang akan tumbuh melengkung ke arah matahari. Batang kelapa berwarna kelabu, licin dan tinggi batang kelapa dapat mencapai 20 meter hingga dengan garis tengah 20 cm hingga 30 cm, tergantung varietas, iklim, tanah, dan jarak tanam. Bagian batang yang sebenarnya dari 7 pohon yang masih muda baru kelihatan jelas jika pohon telah berumur 3-4 tahun, bila mana daun-daun terbawah telah gugur.

c. Daun

Daun kelapa terdiri atas tangkai (petiole) dan pelepah daun (rachis). Pada pelepah terdapat helai daun atau leoflets yang di tengahnya berlidi (midrib). Panjang helai daun berbeda-beda, tergantung pada posisinya. Helai daun yang terdapat di tengah sumbu daun berukuran lebih panjang di banding yang tumbuh di pangkal atau ujung sumbu daun. Pada biji yang baru mula-mula berbentuk 4-6 helai daun tersusun satu membalut yang lain sehingga merupakan selubung dan runcing sebelah ujungnya. Susunan demikian perlu untuk memudahkan menembus lapisan sabut di sebelah pangkal buah. Setelah itu menyusul secara berturut-turut 4-6 helai daunnya belum menyirip. Kemudian daun-daun lainnya menyusul terbentuk berturut-turut, ukurannya bertambah besar.

d. Bunga

Tanaman kelapa mulai berbunga berbeda-beda tergantung jenisnya. Pada kelapa Genjah kira-kira 3-4 tahun, kelapa dalam 4-8 tahun dan kelapa Hibrida berkisar 4 tahun. Dari ketiak daun tumbuh manggar (mayang) yang masih tertutup seludang (spadix). Mayang adalah tangkai bunga yang bercabang-cabang. Di mana tumbuh banyak bunga yang berwarnaputih kekuningan. Kelapa adalah tanaman berumah satu. Pada pangkal cabang tumbuh bunga betina, kemudian menyusul bunga jantan pada bagian atasnya.

e. Buah

Tiga sampai empat minggu setelah seludang mambuka, bunga betina yang sudah di buahi tumbuh menjadi bakal buah. Tetapi tidak semua bakal buah tersebut dapat tumbuh membesar, karena setengah hingga tiga per empat dari jumlah buah akan gugur yang di sebabkan oleh serangan hama dan penyakit,kekurangan unsur hara, kekeringan, atau karena tidak sempurnanya proses penyerbukan. Sesudah dua bulan, buah yang rontok mulai berkurang dari buah selanjutnya mengalami perkembangan yang dapat di bagi menjadi tiga tahap yaitu: Tahap I : pertumbuhan lebih mengarah kepada pemanjangan buah, penambahan luas sabut dan tempurung. Tahap ini berlangsung empat sampai lima bulan. Tahap II : pertumbuhan lebih mengarah pada pelebaran buah, sabut dan tempurung. Enam sampai delapan bulan buah mulai berbentuk. Tahap III : pertumbuhan

memanjang sampai buah menjadi masak, penebalan daging buah dan sabut berubah warna menjadi kecoklatan. Buah mencapai ukuran maksimal sesudah berumur 9-10 bulan dengan berat 3-4 kg berisi cairan 0,3-0,4 liter. Pada umur 12-14 bulan buah telah cukup masak, tetapi beratnya turun menjadi 1,5-2,5 kg dan pada umur ini buah siap untuk di panen atau gugur bila di biarkan (Gun Mardiatmoko 2018).

Acara pertemuan sosialisasi membahas rencana kegiatan Pengembangan Kelapa Genjah di Kab Madiun dengan luas 200 Ha dengan paket kegiatan berupa Bibit 22.000 batang dan pembenah tanah sejumlah 22.000 Liter di Kabupaten Madiun. Adapun persyaratan sebagai calon penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- Calon petani tergabung dalam satu kelompok tani/ gapoktan sesuai ketentuan dan SK yang berlaku.
- Calon petani sebagai penerima manfaat bersedia dan mampu melaksanakan budidaya Tanaman Kelapa Genjah sesuai standar teknis dan sesuai dengan anjuran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
- Calon lahan milik petani (petani pemilik, penyewa dan/atau penggarap) yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan/alamat yang diketahui oleh kepala desa setempat.
- CPCL diprioritaskan pada petani yang belum pernah mendapat bantuan.

Kriteria Standar Benih Kelapa Dalam Polibag :

No	Kriteria	Standar
1	Umur Benih	4-12 Bulan
2	Tinggi Benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah	Minimal 50 cm Minimal 40 cm
3	Jumlah Daun	Lebih dari 4 helai
4	Warna Daun	Hijau
5	Kesehatan	Bebas Hama Penyakit
6	Ukuran Polybag	Minimal 40 cm x 50 cm
7	Warna Polibag	Hitam

8. RAWAT RATOON KEGIATAN PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA GULA KONSUMSI

Maksud dari pelaporan ini dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Swasembada Gula Konsumsi (DIPA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2022. Tujuan dari Pelaporan ini dalam rangka Pengawasan dan pendampingan kegiatan mulai dari Identifikasi dan pemantauan CPCL, Pengawasan dan pendampingan ke lokasi, Koordinasi dan Konsultasi Ke Provinsi serta Monitoring dan Evaluasi ke lokasi dalam Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi (DIPA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2022.

Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Tahun 2022 adalah : DIPA TA 2022 Nomor SP (DIPA) Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tansimpah Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA - 018.05.1.238830/2022 tanggal 12 Februari 2022.

Dana dan Sumber Anggaran

Pelaksanaan Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Tahun 2022 dibiayai dari dana APBN tahun 2022 pada DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan. Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme Kegiatan

Dalam Pelaksanaan Rawat Ratoon salah satu hal terpenting adalah CPCL, oleh karena itu diperlukannya Identifikasi dan Pemantauan CPCL agar memperoleh usulan CPCL Rawat Ratoon. Kegiatan identifikasi CPCL dilaksanakan pada bulan Mei 2022 dengan metode yaitu kunjungan ke lapangan dan Diskusi.

Dalam rangka Kegiatan Pengembangan Tebu Tahun 2022 di Kabupaten Madiun yaitu Rawat Ratoon, Tim Teknis Kabupaten melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Pemantauan CPCL yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2022 di Kecamatan Dolopo, Kebonsari, Geger, Dagangan, Wungu dan Balerejo. Luas areal yang diidentifikasi untuk program Rawat Ratoon adalah 150 ha. Kegiatan Rawat Ratoon dilaksanakan pada lahan keprasan yang secara ekonomis masih menguntungkan untuk dipelihara dan dapat meningkatkan produksi bagi tanaman. Diberikan bantuan berupa pupuk majemuk, pupuk organik, dan obat-obatan.

1. Kriteria Teknis Calon Penerima Bantuan

- Calon Petani (CP), yang tergabung dalam satu kelompok tani sasaran yang mengusahakan tebu sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kelompok tani sasaran penerima bantuan tergabung dalam Gapoktan/ Koperasi berbasis tebu;
- CP, sebagai penerima manfaat bersedia dan mampu melaksanakan budidaya tebu sesuai standar teknis dan sesuai dengan anjuran Dinas yang membidangi perkebunan setempat atau PG wilayah binaan;
- Calon Lahan (CL), lahan milik petani (petani pemilik, penyewa dan/atau penggarap) yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan/bukti sewa/bukti garap yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;

- CL, tidak/sedang menjadi agunan dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya serta tidak dalam sengketa;
- Luas lahan petani tebu sasaran penerima bantuan maksimal 4 Ha per petani;
- Petani/kelompok tani sasaran penerima kegiatan yang sama dapat mengikuti kegiatan Ekstensifikasi (Perluasan) dan Intensifikasi Tebu (Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon) sepanjang luasannya tidak melebihi 4 ha;
- CP/CL diprioritaskan pada petani yang belum pernah mendapat bantuan sehingga memenuhi asas merata dan berkeadilan;
- Kelompok tani baru dapat menerima bantuan dengan syarat pada waktu diusulkan sudah membentuk kelompok tani berbasis tebu, dengan maksud untuk mengakomodir petani tebu mandiri yang belum pernah menerima bantuan pemerintah;
- Petani/kelompok tani sasaran penerima bantuan harus tergabung atau menjadi anggota Gapoktan/koperasi berbasis tebu. Bagi kelompok tani yang belum membentuk Gapoktan/Koperasi berbasis tebu, agar segera membentuk Gapoktan/Koperasi berbasis tebu berbadan hukum;

Menindaklanjuti alokasi kegiatan Rawat Ratoon Program Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Reguler (DIPA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA - 018.05.1.238830/2022 tanggal 12 Februari 2022 dengan penyesuaian Alokasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Tebu TA. 2022 (Revisi DIPA VII) seluas 150 Ha terdapat di 14 kelompok Tani di Kabupaten Madiun.

Berikut ini Rekap Calon Kelompok Tani Penerima Bantuan Rawat Ratoon Reguler Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Konsumsi Tahun 2022 :

No	Nama Poktan	Ketua Poktan	NIK	Alamat			Luas (Ha)
				Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Tani Makmur	Samiran	'3519022504760001	Bader	Dolopo	Madiun	25
2	Rosan Mulya	Badrul Makali	'3519040812710003	Banjarsari Wetan	Dagangan	Madiun	20
3	Tani Sejahtera	Saiful Mu'arif	3519013108650001	Pucanganom	Kebonsari	Madiun	8
4	Sekar Wangi	Hengki Jaka	3519010802770001	Palur	Kebonsari	Madiun	1
5	Rosan Asri	Dyah K	3519015411700001	Kebonsari	Kebonsari	Madiun	5
6	Tani Makmur	Joko Utomo	3519011105720005	Singgahan	Kebonsari	Madiun	2
7	Rosan Jaya	Mujiono	3519011111570000	Sukorejo	Kebonsari	Madiun	5
8	Rosan Madu	Arwani	3519011506740006	Krandegan	Kebonsari	Madiun	4
9	Sido Manis	Herwanto	3519014101770008	Sidorejo	Kebonsari	Madiun	4

No	Nama Poktan	Ketua Poktan	NIK	Alamat			Luas (Ha)
				Desa	Kecamatan	Kabupaten	
10	Tebu Barokah	Joko S	'3577031404790001	Pilangrejo	Wungu	Madiun	16
11	Tebu Subur	Andi Wiyono	3519031111720006	Uteran	Geger	Madiun	10
12	Sae Makmur	Hendri	'3519033101870001	Jatisari	Geger	Madiun	25
13	Barokah	Mardi	3519030512520001	Purwojero	Geger	Madiun	10
14	Tani Sejati	Kadar Priyo	'3519103006550026	Warurejo	Balerejo	Madiun	15
Jumlah							150

Paket bantuan pemerintah untuk Kegiatan Rawat Ratoon TA 2022 adalah pupuk NPK, pembenah tanah, obat-obatan. Bantuan yang bersifat stimulan berupa bantuan pupuk majemuk sebesar 400 kg/ha, pembenah tanah sebesar 13 liter/ha dan obat-obatan sebesar 4 liter/ha. Kekurangannya dipenuhi dari swadaya petani.

A. Spesifikasi Pupuk NPK Non Subsidi

Untuk itu, bantuan pupuk NPK yang diberikan sebesar 400 kg/ha. Spesifikasi Pupuk NPK yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pupuk NPK yang diadakan adalah pupuk NPK non-subsidi minimum mengandung N 15%, P 15%, dan K 15% (NPK 15- 15-15).
2. Syarat mutu pupuk NPK Padat yang memenuhi standar SNI 2803:2010 tentang Pupuk NPK Padat.

Mutu pupuk NPK dibuktikan dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan	Batas Toleransi Minimal yang Dipersyaratkan
1	Nitrogen Total*	%, b/b	Sesuai formula yang ada di label	8%
2	Fosfor total sebagai P ₂ O ₅ *	%, b/b		8%
3	Kalium sebagai K ₂ O*	%, b/b		8%
4	Jumlah kadar N, P ₂ O ₅ , K ₂ O	%, b/b		8%
6	Cemaran Logam			
	- Raksa (Hg)	mg/kg	Maks. 10	-
	- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 100	-
	- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 500	-
7	Arsen (As)	mg/kg	Maks. 100	-

Keterangan : * adalah jenis uji 1 s/d adbk (atas dasar berat kering)

Pupuk NPK yang diadakan terdaftar secara resmi dan dalam masa edar, terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

3. Pada kemasan dicantumkan tulisan "Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan -

Kementerian Pertanian Tahun 2022, Dilarang untuk diperjualbelikan” dan nama produsen.

B. Spesifikasi Pembenh Tanah

Pembenh tanah yang digunakan sekurang-kurangnya mengandung bahan organik 10%. Jumlah bantuan pupuk organik cair yang diberikan sebesar 13 liter/ha. Syarat teknis minimum kandungan pupuk hayati diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261/KPTS/SR.310/ M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah dan terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah). Pada kemasan diharapkan mencantumkan tulisan “**Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian Tahun 2022, Dilarang untuk diperjualbelikan**”, nama produsen.

C. Spesifikasi Herbisida

Herbisida yang diberikan adalah herbisida sistemik pra tumbuh untuk gulma tebu. Jumlah bantuan herbisida yang diberikan sebesar 4 liter/ha. Herbisida yang diadakan terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida). Pada kemasan dicantumkan tulisan “**Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian Tahun 2022, Dilarang untuk diperjualbelikan**” dan nama produsen. Tulisan tersebut dicantumkan baik pada kemasan dalam (misalnya pada botol produk) maupun pada kemasan luar (misalnya kardus).

NO	DOKUMEN
1	Rencana Usulan Kelompok (RUK)
2	Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani
3	Berita Acara Penyerahan Biaya kegiatan
4	Kwitansi Biaya Rawat Ratoon
5	Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
6	Berita Acara Serah Terima (BAST)
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
8	Tambahan
	- Fotokopi Buku rekening (pada saat Biaya HOK masuk dan Pada Saat Biaya HOK di Tarik)
	- Dokumentasi Pelaksanaan Aplikasi Sarana Produksi (HOK)
	- KTP Tenaga Kerja

9. KEGIATAN BANTUAN BENIH JAGUNG WILAYAH KHUSUS (*REALISASI AUTOMATIC ADJUSTMENT*)

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan produksi dalam rangka mendukung peningkatan produksi jagung nasional.

Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Jagung Wilayah Khusus *Realisasi Automatic Adjustment* Tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 248/HK.310/C/10/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2022.

Dana dan Sumber Anggaran

Sumber Anggaran Kegiatan Bantuan Benih Jagung Wilayah Khusus *Realisasi Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Madiun berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2022.

Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan *Budidaya Jagung Wilayah Khusus Realisasi Automatic Adjustment* dilaksanakan dalam bentuk bantuan sarana produksi budidaya jagung kepada kelompok tani, Kabupaten Madiun mendapat alokasi seluas 1000 Ha yang diserahkan kepada kelompok tani yang tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Madiun, Realisasi bantuan dapat terserap seluruhnya meskipun sudah memasuki periode akhir musim tanam tahun 2022.

Tempat pelaksanaan Kegiatan berada di 9 Kecamatan Yaitu Kecamatan Dolopo, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Madiun dengan jumlah penerima 94 kelompok tani penerima bantuan .

Komponen bantuan yang diberikan berupa 4 jenis bantuan yaitu Benih Jagung Hibrida varietas NK 22 sebanyak 15 Kg/ha, Pupuk NPK sebanyak 100 Kg/ha, Pupuk Hayati 2 liter/ha, dan pupuk silika 1.5 Kg/ha. Dengan usulan Luas bantuan sebesar 1000 ha, Kabupaten madiun mendapatkan total 15.000 Kg Benih Jagung Hibrida Varietas NK 22, Pupuk NPK sebanyak 100.000 Kg, Pupuk Hayati sebanyak 2000 liter dan pupuk silika sebanyak 1500 Kg Jumlah nilai bantuan

No	KECAMATAN	LUAS (ha)	JENIS BANTUAN				REALISASI
			JUMLAH BENIH (Kg)	PUPUK NPK (Kg)	PUPUK HAYATI (PAKET)	PUPUK SILIKA (PAKET)	
1	Dolopo	32	480	3.200	64	48	100%
2	Wungu	152	2.280	15.200	304	228	100%
3	Kare	398	5.970	39.800	796	597	100%
4	Gemarang	14	210	1.400	28	21	100%
5	Saradan	164	2.460	16.400	328	246	100%
6	Pilangkenceng	50	750	5.000	100	75	100%
7	Mejayan	100	1.500	10.000	200	150	100%
8	Wonoasri	60	900	6.000	120	90	100%
9	Madiun	30	450	3.000	60	45	100%
J U M L A H		1.000	15.000	100.000	2.000	1.500	100%

10. PENGELOLAAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan benih kedelai bersertifikat dan sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai.

Dasar Pelaksanaan

Surat dari Direktur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 254/HK.310/C/11/2021 Tentang Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun Anggaran 2022

Dana dan Sumber Anggaran

Sumber Anggaran Kegiatan Pengembangan Kedelai, dari DIPA Pusat TA 2022.

Kelompok Tani menerima bantuan dalam bentuk barang, yang terdiri dari total Benih kedelai 5.000 Kg ,Pupuk NPK (Non Subsidi) 4.500 Kg, Pestisida 200 Lt, Pupuk hayati Cair 300 Lt untuk 100 Ha.

Mekanisme Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai seluas 100 Ha dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai seluas 100 Ha di 4 kelompok tani, dan berada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Jiwan

Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai seluas 100 Ha sudah realialisasi 100%, dan sudah panen pada bulan september 2022 dengan hasil provitas rata- rata 1,9 ton/ ha

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Realisasi (%)
1.	Jiwan	Grobogan	Dadi Rukun I	26	100
2.	Jiwan	Grobogan	Dadi Rukun II	25	100
3.	Jiwan	Grobogan	Dadi Rukun III	25	100
4.	Jiwan	Grobogan	Dadi Rukun IV	24	100
JUMLAH				100	

11. SARANA PRODUKSI BUDIDAYA PORANG

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan bantuan sarana produksi berupa bibit bersertifikat dan pupuk organik non subsidi **Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang**, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Porang.

Dasar Pelaksanaan

Surat dari Direktur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 254/HK.310/C/11/2021 Tentang Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun Anggaran 2022

Dana dan Sumber Anggaran

- Sumber Anggaran Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang, dari DIPA Pusat TA 2022.
- Total Anggaran untuk 5 Ha sejumlah Rp. 281.250.000 dengan rincian per ha Rp. 56.250.000
- Kelompok Tani menerima dalam bentuk uang masuk ke rekening kelompok Tani

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Pelaksanaan Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang seluas 5 Ha dilaksanakan pada bulan Oktober 2022.
- Tempat pelaksanaan Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang di Kabupaten Madiun antara lain :
 - Kecamatan Saradan seluas 2 Ha
 - Kecamatan Kare seluas 2 Ha
 - Kecamatan Gemarang seluas 1 Ha

Realisasi Kegiatan

Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang seluas 5 Ha sudah realisasi 100 %.

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1.	Saradan	Klangon	Bangun Karso	2	112.500.000	100
2.	Kare	Kepel	Sarwo Asih	2	112.500.000	100
3.	Gemarang	Durenan	Podang Wilis	1	56.250.000	100
JUMLAH				5	281.250.000	

12. PENGELOLAAN PRODUKSI BUDIDAYA KACANG HIJAU

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan hasil produktivitas tanaman kacang hijau

Dasar Pelaksanaan

Pengelolaan Produksi Budidaya Kacang Hijau tahun 2022 adalah Dipa Pemerintah Pusat Tahun 2022.

Mekanisme Pelaksanaan

Alokasi bantuan pada Pengelolaan Produksi Budidaya Kacang Hijau di Kabupaten Madiun terdapat bantuan pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Madiun Nomor:521.1/268/402.109/2021 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Tahun 2022 Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang Hijau.

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Ketua	NIK	No HP	Jumlah Anggota	Luas lahan (Ha)	Benih (Kg)	Varietas Benih	Jadwal Tanam	Provitas Existing (ku/ha)	Target Provitas (ku/ha)
TOTAL								50	1250				
1	Pilangkenceng	Wonoayu	Ngudi Rejeki	Aris Basuki	3519130412760002	08121602556	82	25	625	Vima 3	Juli 22	12	13
2		Wonoayu	Sumber Rejeki	Chamim	3519132007650002	085330745484	76	15	375	Vima 3	Juli 22	12	13
3		Kenongorejo	Tirto Langgeng	Suminto	3519131012760001	081387706098	121	10	250	Vima 3	Juli 22	12	13

Dengan jumlah areal CPCL seluas 50 Hektar, dan jumlah bantuan benih sebanyak 1.250 kg.

Sasaran dan Realisasi Kegiatan Kacang Hijau Per Kelompok Tani

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Ketua	NIK	No HP	Jumlah Anggota	Luas lahan (Ha)	Benih (Kg)	Varietas Benih	Jadwal Tanam	Realisasi (%)
TOTAL								50	1250			
1	Pilangkenceng	Wonoayu	Ngudi Rejeki	Aris Basuki	3519130412760002	08121602556	82	25	625	Vima 3	Juli 22	100
2		Wonoayu	Sumber Rejeki	Chamim	3519132007650002	085330745484	76	15	375	Vima 3	Juli 22	100
3		Kenongorejo	Tirto Langgeng	Suminto	3519131012760001	081387706098	121	10	250	Vima 3	Juli 22	100

Peningkatan produksi / provitas kegiatan Kacang Hijau

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Ketua	NIK	No HP	Luas lahan (Ha)	Provitas (Ton/ha)	Produksi (Ton)	Harga (Rp)
TOTAL							50		65	
1	Pilangkenceng	Wonoayu	Ngudi Rejeki	Aris Basuki	3519130412760002	08121602556	25	1.3	32.5	17.000
2		Wonoayu	Sumber Rejeki	Chamim	3519132007650002	085330745484	15	1.3	19.5	17.500
3		Kenongorejo	Tirto Langgeng	Suminto	3519131012760001	081387706098	10	1.3	13	17.000

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan 100% sesuai target tanam dalam SK, untuk Kecamatan Pilangkenceng mendapatkan bantuan Kacang Hijau sebesar 50 ha, yaitu :

- 1) Kelompok tani Ngudi Rejeki Desa Wonoayu Ketua Aris Basuki, bantuan benih kacang hijau sebanyak 625 kg dengan luas areal banpem 25 ha, varietas vima 3, kelompok ini terdiri dari 82 orang anggota, yang mempunyai lahan secara keseluruhan 49,71ha. Kelompok ini baru mendapat bantuan kacang hijau dari APBN Tahun 2022.
- 2) Kelompok tani Sumber Rejeki Desa Wonoayu Ketua Chamim, bantuan benih kacang hijau sebanyak 375 kg dengan luas areal banpem 15 ha, varietas vima 3, kelompok ini terdiri dari 76 orang anggota, yang mempunyai lahan secara keseluruhan 53,67ha. Kelompok ini baru mendapat bantuan kacang hijau dari APBN Tahun 2022.
- 3) Kelompok tani Tirto Langgeng Desa Kenongorejo Ketua Suminto, bantuan benih kacang hijau sebanyak 250 kg dengan luas areal banpem 10 ha, varietas vima 3, kelompok ini terdiri dari 121 orang anggota, yang mempunyai lahan secara keseluruhan 66,75ha. Kelompok ini baru mendapat bantuan kacang hijau dari APBN Tahun 2022.
 - Lahan yang digunakan untuk kacang hijau yaitu lahan sawah dengan pola tanam padi – padi – palawija, apabila tidak mendapat bantuan dari pemerintah kelompok tetap swadaya menanam kacang hijau.
 - Penanaman Banpem kacang hijau 50 ha dilaksanakan bulan juli 2022 dan panen pada bulan september-oktober 2022.
 - Hasil produksi kacang hijau biasanya dipakai untuk konsumsi sekitar atau dijual dengan harga Rp.17.000. Penanaman secara swadaya diperoleh benih yang berasal dari benih yang bersertifikat dengan harga Rp.25.000.
 - Produktivitas kacang hijau hasil banpem sebesar 13 kw/ha jauh lebih meningkat dari penanaman sebelumnya sekitar 12 kw/ha.Keuntungan dalam sekali musim tanam kacang hijau biasanya mencapai keuntungan Rp.9.100.000 dengan rincian (Total Panen Rp. 22.100.000 – Total Pengeluaran Rp. 13.000.000)

- Kelompok tani sudah terinput laporannya di aplikasi SI PDPS & Banpem TP serta sudah terpoligon di sitampam.

13. PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN OBAT

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya Kampung Hortikultura yang tersebar secara merata di seluruh Indonesia pada Tahun 2022 sebagai program untuk meningkatkan produktifitas komoditas subsektor hortikultura. Tujuan dari Kegiatan kampung Hortikultura ini untuk meningkatkan produksi dan pemenuhan pangan, dibidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat,.

Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura , dan Program Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2022, berdasar Petunjuk Teknis dari Direktorat Buah dan Florikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Dana dan Sumber Anggaran

Dana yang diperlukan untuk kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, dan Program Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat,terdapat pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2022.

Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagai pelaksana , menerima alokasi sarana produksi dan bibit buah maupun Bibit Obat/ Jahe, yang diberikan langsung kekelompok tani penerima sesuai SK dari Direktorat Jenderal Hortikultura., sesuai dengan Pagu Anggaran dan luasan kampung di masing-masing lokasi CPCL.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan ini, Direktorat Jenderal Hortikultura menunjuk Tim Teknis kegiatan . Tugas dari TimTeknis Kegiatan adalah melakukan Pemeriksaan Barang, Pengawasan dan Pengarsipan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) , melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kegiatan.

Jadwal distribusi masing-masing sarana produksi akan dikoordinasikan langsung oleh pihak penyedia / tim ekspedisi pengiriman dengan tim teknis kegiatan yang sudah ditetapkan melalui Surat Usulan TimTeknis yang ditandatangani Kepala Dinas Setempat.

TimTeknis mendokumentasikan pmdistribusian sarana produksi tersebut mulai saat proses dropping,serah terima kepada kelompok tani, sampai pada kegiatan penanaman.Dokumentasi dilakukan melalui open camera minimal meliputi nama kelompok tani,lokasi,waktu dan titik koordinat. Dalam rangka tertib administrasi, tim

teknis dapat menyimpan, 1 salinan dokumen berita acara serah terima (BAST) yang diserahkan oleh penyedia sebagai arsip di dinas.

c. Permasalahan

Kegiatan APBN terkendala perubahan DIPA dan realokasi anggaran yang terjadi beberapa kali selama pelaksanaan kegiatan.

d. Penyelesaian Masalah

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka melakukan penilaian terhadap akuntabilitas organisasi perangkat daerah, setiap tahunnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian pada setiap indikator yang termuat di dalamnya. Berdasarkan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP seperti yang tertuang dalam Surat Inspektur Kabupaten Madiun no. 790/1776/402.060/2022 ,Dinas Pertanian dan Perikanan pada tahun 2021 memperoleh predikat “**sangat baik**” dengan nilai sebesar **77,04**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pertanian dan Perikanan. Beberapa catatan terkait dengan evaluasi tersebut telah menjadi focus dan perhatian Dinas Pertanian dan Perikanan untuk kemudian ditindaklanjuti. Adapun beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan diantaranya adalah :

- ✓ Melakukan koordinasi internal utamanya dengan bidang teknis untuk membuat rancang bangun aplikasi yang paling sesuai dan memungkinkan untuk diimplementasikan sebagai sarana untuk pengumpulan data kinerja dan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan
- ✓ Melakukan pematangan dan pemantapan program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (*P4S*) dengan melibatkan petani milenial di Kabupaten Madiun. *P4S* merupakan salah satu lembaga masyarakat yang dimiliki dan dikelola petani langsung baik secara perorangan maupun kelompok dalam meningkatkan peran aktif pembangunan pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian seperti pelatihan, penyuluhan, dan Pendidikan.
- ✓ Pemberian *reward* terhadap personal pegawai berprestasi berupa penghargaan dan uang pembinaan juga *punishment* terhadap pegawai yang dinilai tidak memiliki kinerja yang baik melalui upaya preventif dengan mengedepankan nilai humanisme sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi internal dinas akhirnya akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam penataan organisasi di tahun berikutnya.

- ✓ Seluruh rekomendasi telah menjadi catatan dan fokus pimpinan juga unsur pendukung dibawahnya untuk kemudian menjadi bahan perbaikan baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pada evaluasi seluruh program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian dan Perikanan untuk lebih baik lagi kedepannya utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Madiun.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah urusan pilihan pertanian dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun terdiri dari 5 (lima) bidang dan 1 (satu) sekretariat dengan komposisi organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Perikanan mengalami beberapa tantangan yang menjadi isu strategis dinas, diantaranya adalah:

1. Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian dan perikanan
2. Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan degradasi lahan
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan

4. Resiko kehilangan hasil yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian lokal terhadap produk import
5. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani
6. Belum optimalnya kelembagaan petani

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RPD

Adapun program prioritas pertanian dan perikanan diharapkan menjadi salah satu pendorong peningkatan beberapa aspek dalam mendukung tematik ataupun prioritas RPD Tahun 2024. Sebagaimana **Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan RPD Tahun 2024**, yaitu **"Pemantaban Stabilitas Sosial dan Ekonomi Dalam Penguatan Ketahanan Daerah"**. Berdasarkan rancangan awal RPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2024 adalah sebagaimana Lampiran II:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Setiap daerah harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, pada Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap SKPD juga diwajibkan untuk membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Tujuan RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian

Sasaran :

Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan

Indikator :

Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisendapatan Petani satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menjalankan 8 Program, 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam

1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

V. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

VI. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
2. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian
 - c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM parit
 - e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya
 - f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

VII. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

VIII. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Pertanian dan perikanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pada sektor ekonomi Pemerintah Kabupaten Madiun 2024 – 2026 yaitu **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi”**. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Dinas Pertanian dan Perikanan 2024- 2026, yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD sebagaimana tercantum pada lampiran III.

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tahun 2024-2026.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2024 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Madiun.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I :

REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)	REALIASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
					RP	%		KINERJA	%
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,01	50.000.000	48.762.125	97,52	1.237.875	0,04	400,00
1.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	508.916 kg	50.000.000	48.762.125	97,52	1.237.875	48.762,13	97,52
1.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah benih ikan yang diperbantukan	50.000 ekor	50.000.000	48.762.125	97,52	1.237.875	145.050 ekor	290,10
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1%	220.000.000	204.530.000	92,97	15.470.000	1,04	104,00
2.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.614.774 kg	220.000.000	204.530.000	92,97	15.470.000	3.649.100 kg	100,95
2.1.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan pakan ikan di UPT	1 paket	220.000.000	204.530.000	92,97	15.470.000	1 paket	100,00
3.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan	2%	130.000.000	63.232.040	48,64	66.767.960	30,60%	1530,00
3.1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM pengolahan ikan	15 unit usaha	130.000.000	63.232.040	48,64	66.767.960	16 unit usaha	106,67
3.1.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	* Jumlah Produk Olahan Ikan	10.400 kg	130.000.000	63.232.040	48,64	66.767.960	13/334 kg	96,36
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	* Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	14.585.054.685	14.054.734.960	96,36	530.319.725	BB	94,44
		* Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	90					85	94,44
4.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu	100%	7.500.000	7.154.200	95,39	345.800	100%	100,00
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 dok	7.500.000	7.154.200	95,39	345.800	14 dok	116,67
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	13.306.657.175	12.841.765.432	96,51	464.891.743	100%	100,00
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang terpenuhi	12 bln	13.306.657.175	12.841.765.432	96,51	464.891.743	12 bln	100,00
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	413.682.093	366.721.864	88,65	46.960.229	100%	100,00
4.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi	12 bln	7.000.000	6.957.500	99,39	42.500	12 bln	100,00
4.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perkantoran yang terpenuhi	12 bln	24.630.000	24.461.750	99,32	168.250	12 bln	100,00
4.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang terpenuhi	12 bln	30.805.000	30.774.412	99,90	30.588	12 bln	100,00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)	REALIASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
					RP	%		KINERJA	%
4.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia	12 bln	129.600.000	129.424.140	99,86	175.860	12 bln	100,00
4.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	12 bln	10.000.000	9789340	97,89	210.660	12 bln	100,00
4.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi	12 bln	4.400.000	4.200.000	95,45	200.000	12 bln	100,00
4.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 bln	207.247.093	161.114.722	77,74	46.132.371	12 bln	100,00
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	406.442.177	391.397.964	96,30	15.044.213	100%	100,00
4.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 bln	5.000.000	4.990.092	99,80	9.908	12 bln	100,00
4.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	117.270.417	109.671.237	93,52	7.599.180	12 bln	100,00
4.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	284.171.760	276.736.635	97,38	7.435.125	12 bln	100,00
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara	100%	450.773.240	447695500	99,32	3.077.740	100%	100,00
4.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	123.000.000	121.984.620	99,17	1.015.380	12 bln	100,00
4.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	20.000.000	19.954.400	99,77	45.600	12 bln	100,00
4.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran yang dilaksanakan	12 bln	300.773.240	298.771.480	99,33	2.001.760	12 bln	100,00
4.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran lainnya yang dilaksanakan	12 bln	7.000.000	6.985.000	99,79	15.000	12 bln	100,00
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	8,14%	1.596.033.250	1.520.217.122	95,25	75.816.128	7,24%	88,94
5.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	18 kel	1.596.033.250	1.520.217.122	95,25	75.816.128	16 kel	88,89
5.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan	700 btg	600.000.000	588.554.280	98,09	11.445.720	700 btg	100,00
		Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan	1850 btg					2.730 btg	147,57
5.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan	53 unit	996.033.250	931.662.842	93,54	64.370.408	1.089 unit	2178,00
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	4%	9.850.252.263	9.614.939.687	97,61	235.312.576	4%	100,00
6.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan :		2.198.462.734	2.088.574.220	95,00	109.888.514		
		* pupuk	39.533 kg					17.133 kg	43,34
		* bibit	1.621.158 btg					767.610 btg	47,35
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah subsidi harga pupuk	367.500 kg	2.198.462.734	2.088.574.220	95,00	109.888.514	-	0,00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)	REALIASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
					RP	%		KINERJA	%
		Jumlah sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan :							
		* Alsintan	6 unit					15 unit	250
		* Jalan produksi	3 unit					3 unit	100
		* Jaringan irigasi	3 unit					2 unit	66,67
6.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	1.978 unit	7.651.789.529	7.526.365.467	98,36	125.424.062	1.978 unit	100,00
6.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara	10 unit	6.283.884.800	6.226.544.550	99,09	57.340.250	20 unit	200,00
6.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik	400 ltr	1.367.904.729	1.299.820.917	95,02	68.083.812	475 ltr	118,75
7.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	99,05	548.000.000	535.898.100	97,79	12.101.900	87,40	87,84
7.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian	11,41%	548.000.000	535.898.100	97,79	12.101.900	68,92%	604,44
7.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati	45 kel	548.000.000	535.898.100	97,79	12.101.900	272 kel	604,44
8.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	7%	4.384.110.250	4.058.980.994	92,58	325.129.256	7,67%	109,57
8.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	180 kel	4.384.110.250	4.058.980.994	92,58	325.129.256	197 kel	109,44
8.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek	96 orang	200.000.000	197.873.390	98,94	2.126.610	92 orang	95,83
8.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan	600 orang	705.000.000	697.754.254	98,97	7.245.746	460 orang	76,67
8.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	75%	106.500.000	95.490.000	89,66	11.010.000	75%	100,00
8.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan	20 SL	3.372.610.250	3.067.863.350	90,96	304.746.900	20 SL	100,00
JUMLAH				31.363.450.448	30.101.295.028	95,98	1.262.155.420		

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024 PRAKIRAAN MAJU 2025

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		LOKASI
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	(Rp)
	TUJUAN DAERAH						
	Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Mengembangkan Sektor Potensial dan Mendorong Masuknya Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	4,29* (moderat)		4,87* (moderat)		
	SASARAN DAERAH 1						
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial	1.PDRB Sektor Pertanian	1,75*		1,93*		
		2.PDRB Sektor Industri Pengolahan	1,63*		2,24*		
		3.PDRB Sektor Perdagangan	-1,03*		-0,52*		
			0,25**		0,50**		
	TUJUAN OPD						
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian	PDRB sektor Pertanian	1,75*		1,93*		
	SASARAN OPD						
	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	0,06	21.917.508.856	0,07	22.231.531.018	
	URUSAN PERIKANAN						
	PROGRAM						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,01	75.000.000	0,01	82.500.000	Kab. Madiun
	KEGIATAN						
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	509.551	75.000.000	509.602	82.500.000	
	Sub Kegiatan						
	Penjaminan ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	1	75.000.000	1	82.500.000	
	PROGRAM						

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024 PRAKIRAAN MAJU 2025

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		LOKASI
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,08	130.000.000	1,10	143.000.000	Kab. Madiun
	KEGIATAN						
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.687.431	130.000.000	3.724.305	143.000.000	
	Sub Kegiatan						
	Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	1	130.000.000	1	143.000.000	
	PROGRAM						
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan	2,02	125.000.000	2,05	137.500.000	Kab. Madiun
	KEGIATAN						
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM pengolahan ikan	15	125.000.000	15	137.500.000	
	Sub Kegiatan						
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	0,2	125.000.000	0,2	137.500.000	
	URUSAN PERTANIAN						
	PROGRAM						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	1.067.435.600	81	1.067.435.600	Kab. Madiun
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	85	13.958.522.818	86	13.958.522.818	
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	60,94	1.064.400	66,34	1.064.400	
	KEGIATAN						

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024 PRAKIRAAN MAJU 2025

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		LOKASI
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	(Rp)
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu	100	7.500.000	100	7.500.000	
	Sub Kegiatan						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	7.500.000	12	7.500.000	
	KEGIATAN						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	13.958.522.818	100	13.958.522.818	
	Sub Kegiatan						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	160	13.958.522.818	160	13.958.522.818	
	Kegiatan						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	401.978.240	100	401.978.240	
	Sub Kegiatan						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	5.000.000	4	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	59.900.000	2	59.900.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	20.778.240	4	20.778.240	

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024 PRAKIRAAN MAJU 2025

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		LOKASI
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	135.535.600	4	135.535.600	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	7.000.000	4	7.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	2.700.000	12	2.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	170.000.000	4	170.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	66	1.064.400	66	1.064.400	
	KEGIATAN						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	480.321.760	100	480.321.760	
	Sub Kegiatan						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	5.000.000	4	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	125.900.000	12	125.900.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	349.421.760	12	349.421.760	
	KEGIATAN						

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024 PRAKIRAAN MAJU 2025

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		LOKASI
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara	100	178.700.000	100	178.700.000	
	Sub Kegiatan						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	135.000.000	8	135.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	25.000.000	45	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	8.700.000	1	8.700.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	10.000.000	3	10.000.000	
	PROGRAM						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	2	2.327.288.723	2	2.415.153.159	Kab. Madiun
	KEGIATAN						
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	20	2.327.288.723	22	2.415.153.159	
	Sub Kegiatan						
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	2	1.552.288.723	2	1.552.288.723	

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024 PRAKIRAAN MAJU 2025

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		LOKASI
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	3	775.000.000	3	862.864.436	
	PROGRAM						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	4	2.455.697.315	4	2.563.855.041	Kab. Madiun
	KEGIATAN						
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan :		1.720.000.000		1.820.000.000	
		* Tunel	10		10		
		* JUT	2.010		2.010		
		* Saluran Irigasi	376		376		
	Sub Kegiatan						
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	103	70.000.000	103	70.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	7	1.650.000.000	8	1.750.000.000	
	KEGIATAN						
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	22	735.697.315	22	743.855.041	
	Sub Kegiatan						
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	75.000.000	1	75.000.000	

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024 PRAKIRAAN MAJU 2025

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		LOKASI
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Pembangunan , Rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	120.000.000	1	120.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2	150.000.000	2	150.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM parit	Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	120.000.000	1	120.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	150.000.000	1	150.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	120.697.315	1	128.855.041	
	PROGRAM						
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	98,33	175.000.000	98,36	200.000.000	Kab. Madiun
	KEGIATAN						
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah sarana pengendalian OPT yang terpenuhi	0,06	175.000.000	0,09	200.000.000	
	Sub Kegiatan						
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	48	175.000.000	72	200.000.000	
	PROGRAM						

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024 PRAKIRAAN MAJU 2025

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		LOKASI
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	(Rp)
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	9	1.602.500.000	10	1.662.500.000	Kab. Madiun
	KEGIATAN						
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	231	1.602.500.000	256	1.662.500.000	
	Sub Kegiatan						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	15	250.000.000	15	300.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12	1.180.000.000	14	1.190.000.000	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	15	172.500.000	15	172.500.000	
				21.917.508.856		22.231.531.018	